Ekober
ePaper Koran Bernas

TAHUN KE-5
EDISI KE 13/2021
TERBIT 16 HALAMAN

JUMAT KLIWON 27 AGUSTUS 2021
18 SURA 1955 ALIP

KORAN BERNAS
www.koranbernas.id
JUJUR - KONSTRUKTIF - BERETIKA

ILUSTRASI: LILIK SUMANTORO/KORANBERNAS.ID

Pandemi dan Generasi Lulusan Corona

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Tak pernah terbanyangkan di benak Kiki Rohmad dan Aisyah, dua siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Jogonalan Klaten itu harus mengeyam pendidikan yang berbeda dari kakak-kakak mereka. Di tengah pandemi Covid-19, mereka setiap hari harus rela belajar dari rumah.

Tanpa seragam, tanpa sepatu, mereka harus mampu mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Tak ada guru yang langsung mengawasi mereka, bahkan sekedar mengomentari kerapian seragam mereka seperti yang pernah dirasakan sebelum pandemi.

Bersusah payah mencari jaringan internet agar bisa terhubung dengan sekolah menjadi kebiasaan yang harus mereka jalani sejak tahun lalu. Belum lagi predikat "lulusan Covid-19" atau "lulusan Corona" yang terpaksa melekat pada diri mereka.

"Bingung kalau dari rumah dengan paketan (data). Kadang *lemot* jaringannya," kata mereka kepada *Koranbernas.id*, Jumat (20/8/2021).

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus saja diperpanjang, membuat keduanya terpaksa menghapus mimpinya untuk bisa kembali ke sekolah dan mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Kerinduan untuk bisa belajar bersama nampaknya masih jauh dari harapan.

Sementara mereka dan banyak peserta didik lainnya masih kesulitan dalam beradaptasi dengan PJJ meski sudah berjalan hampir 1,5 tahun. Tak hanya masalah jaringan, ketersediaan *gadget* untuk bisa mengikuti PJJ pun sering membuat mereka sulit menerima pembelajaran. "Kadang juga tidak bisa membeli paket data," ujarnya.

SMP Negeri 1 Jogonalan pun akhirnya mengevaluasi sistem pembelajaran daring. Siswa yang terkendala dengan PJJ diperbolehkan belajar di sekolah menggunakan wifi sekolah. Tentunya dengan protokol kesehatan ekstra ketat. Bagi siswa yang sama sekali tidak memiliki *gadget*, boleh belajar di komputer sekolah di laboratorium sekolah.

"Diawal pandemi Covid-19 bulan Maret 2020 disepakati belajar dengan sistem aplikasi. Bekerja sama dengan Microsoft Indonesia melalui program seribu akun gratis. Menggunakan akun *office 365*. Jadi sejak saat itu sekolah belum pernah sama sekali memasukkan siswa. Apalagi Jogonalan zona merah. Tahun ini siswa yang terkendala jaringan boleh pakai wifi sekolah dengan prokes ketat," kata Endah Sulistyowati, Kepala SMP Negeri 1 Jogonalan, Klaten.

Masalah tak berhenti disini. Para guru pun seringkali mengalami kesulitan dalam pengoperasian teknologi digital. Pihak sekolah terpaksa mengadakan diklat guru agar bisa mengajar sesuai kurikulum di masa pandemi. Sekolah pun menerapkan sistem pembelajaran anak-anak dengan guru memakai kelas tim. Sedangkan penilaian menggunakan *microsoft form*.

Permasalahan serupa terjadi di SD Negeri 3 Majegan Tulung. Kepala SD Negeri 3 Majegan Eny Budiarsih menyebutkan tidak semua siswa punya gadget untuk belajar daring. Alih-alih smartphone, pembelajaran memakai alat peraga pun belum bisa membuat semua siswa bisa menerima pelajaran.

▶ Bersambung ke hal 2

Kualitas Pendidikan Turun, Bisnis Kos Terpuruk

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Pembelajaran jarak jauh telah menurunkan kualitas pendidikan. Tak terkecuali di Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai salah satu barometer pendidikan.

"Tak usah ditanya lagi, Karena sudah sekian lama tidak melakukan pelajaran secara langsung atau pembelajaran tatap muka tentu kualitas pendidikan akan menurun," papar Darmaningtyas, pemerhati pendidikan, saat dihubungi *koranbernas.id*, Sabtu (21/8/2021).

Parahnya, Darmaningtyas melanjutkan, penurunan kualitas tidak hanya terjadi kepada murid tetapi juga berdampak bagi tenaga pengajar. Hal ini terjadi karena banyak hal, antara lain sikap murid yang kurang antusias dalam menerima pelajaran yang disampaikan secara daring. Siswa yang tidak patuh terhadap pengerjaan tugas, dan infrastruktur untuk melakukan pembelajaran secara daring belum benar-benar memadai dan merata.

"Bagi siswa, penurunan kualitas juga disebabkan oleh adanya tenaga pengajar yang hanya sekedar menyelesaikan tanggung jawabnya mengajar. Tetapi tidak memperhatikan atau menitikberatkan kepada terserapnya ilmu dengan baik," katanya.

Sedangkan Diana Setiyawati, Psikolog sekaligus dosen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, berpendapat sekolah dari rumah itu sebenarnya oke-oke saja, asalkan sekolah siap berinovasi. "Tidak hanya sekedar memindahkan pembelajaran dari buku yang biasanya disampaikan di sekolah menjadi online, tidak sekedar itu. Tapi juga harus banyak inovasi yang dilakukan agar anak terlibat dalam pembelajaran," ujarnya.

Harus ada trik agar siswa antusia meski berlajar jarak jauh. Pada saat yang sama, guru juga harus belajar cepat. Tugas-tugas harus dimodifikasi dan disesuaikan dan diinovasi dengan cepat, agar para siswa dapat menerima dengan baik.

Selain itu pihak keluarga juga

▶ Bersambung ke hal 2

Navigasi

Menyelam di Sungai Bawah Tanah

Tim Dislambair Komando Koarmada II menyelam di sungai bawah tanah kedalaman 104 meter. Mereka berhasil memperbaiki peralatan bendungan sungai bawah tanah yang rusak.

HAL 10

Labu Diburu

Buah labu yang ditanam Suryanto warga Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro Bantul ini banyak diburu. Diyakini berkhasiat, permintaan buah ini tinggi saat pandemi.

HAL 14

Pandemi dan...

Sambungan dari hal 1

"Jika pembelajaran secara daring semakin lama maka anak didik akan jauh dari mutu atau mutu tidak ada," tandasnya.

Bosan Belajar di Rumah

Penerapan sekolah *online* yang terus berlanjut mengancam semangat nasionalisme, termasuk jiwa dan karakter siswa sekolah yang *notabene* merupakan generasi penerus bangsa. Sebagaimana yang terjadi dua pekan lalu di Gunungkidul.

Tujuh pelajar SMP di Wonosari, terpaksa berurusan dengan polisi. Karena mereka tertangkap saat melakukan perusakan bendera dan umbul-umbul di pinggir jalan yang dipasang warga untuk menyambut HUT Kemerdekaan. Mereka mengaku hanya iseng karena merasa bosan di rumah akibat lama tidak sekolah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Sudya Marsita, berpendapat PJJ berdampak terkikisnya karakter, termasuk budi pekerti anak. "Dulu ketika anak-anak dalam pengawasan ketat guru saja, jiwa karakternya sudah mulai kendor. Apalagi sekarang, pengawasan lebih banyak diserahkan orangtuanya, ternyata justru kendor," kata Sudya Marsita, Kamis (19/8/2021).

Fakta ini diakui menjadi tantangan bersama. Untuk itulah pihaknya berharap peran aktif orangtua dalam mendidik anak di rumah, untuk ditingkatkan. "Sesibuk apapun kami hanya berharap agar pengawasan pada anak-anaknya tetap diperhatikan," pintanya.

Pada sisi lain, PJJ juga berdampak banyaknya sekolah yang kekuarangan siswa baru. Menurut Sudya Marsita, 25 persen sekolah di Gunungkidul kekuarangan siswa. Juga disampaikan Kiswara, Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul. Ada 34 SMP negeri di Gununglidul yang saat ini kekurangan siswa.

"Dari 34 SMP Negeri, jumlahnya ada 789 kursi yang masih kosong," kata Kiswara.

Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah sekolah di Kebumen. Kepala SMK Nawa Bakti Kebumen, Asbani M.Pd, menyebut tahun ajaran baru 2019 jumlah siswa baru kelas 10 sebanyak 419 orang. Sedangkan di tahun ajaran 2020 menurun menjadi 385 orang dan tahun 2021 menurun lagi menjadi 289 orang.

Sedangkan Joko Purwanto M.Pd, Kepala SMK Taman Karya Kebumen, menyebut penurunan jumlah siswa baru, salah satunya disebabkan naiknya angka peserta didik yang tidak melanjutkan sekolah. Sebab banyak orang tua yang meragukan kualitas pembelajaran daring.

"Di beberapa desa saya mendengar, lulus SMP memilih kerja dulu, daripada sekolah daring," katanya.

Penggabungan Sekolah

Untuk mengatasi banyaknya sekolah yang tidak mendapatkan siswa baru, maka tahun 2021 ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berencana melakukan regrouping atau penggabungan sekolah. Hal ini dikarenakan beberapa Sekolah Dasar (SD) di Gunungkidul selalu kekurangan murid sehingga kegiatan belajar mengajar tidak maksimal.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Sudya Marsita, menyatakan rencananya ada satu sekolah yang akan melebur dengan sekolah lain, yaitu SD Negeri Candirejo 1 dengan SD Negeri Candirejo 2 Korwil Semin. Penggabungan sekolah ini dimaksudkan agar layanan pendidikan lebih optimal, maksimal, dan efisien. Kemudian juga mengatasi potensi kekurangan murid.

Berdasar pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, ada 58 SD Negeri yang direncanakan untuk diregrouping. Namun memang hingga sekarang ini belum semuanya dapat diregrouping karena berbagai hal. Meski sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu sampai sekarang baru 17 sekolah yang diregrouping. Sedangkan 41 sekolah lainnya masih dalam perencanaan pemerintah.

Harus Kreatif

Di Kabupaten Sleman, PJJ juga masih menjadi pilihan utama. Terlebih, kasus baru Covid-19 di kabupaten ini masih fluktuatif setiap harinya.

"Karena dari Pemerintah belum mengijinkan tatap muka maka di Sleman belum ada satu pun sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka," kata Ery Widaryana ketika dihubungi koranbernas.id, Kamis (19/8/2021).

Menurut Ery, layanan pendidikan di Sleman harus tetap optimal walaupun menggunakan metode PJJ. Sekolah dan guru harus kreatif dalam memanfaatkan inovasi.

Sebab PJJ membuat sejumlah sekolah harus tutup atau kehilangan banyak siswa di tahun ajaran 2021/2022. Meski hingga kini Dinas Pendidikan Sleman belum menerima laporan adanya sekolah yang tutup karena PJJ.

"Semua sekolah di Sleman dapat siswa walaupun ada beberapa sekolah yang menurun siswanya karena memang daya tampung lebih besar," kata Ery.

Sedangkan Pemprove DIY memilih strategi mempercepat vaksinasi untuk pelajar. "Vaksinasi pelajar ini untuk kesiapan kalau nanti siswa bisa sekolah tatap muka," ujar Sekda DIY, Baskara Aji.

Vaksinasi di tingkat pelajar dikerjasamakan dengan sejumlah pihak di tingkat kabupaten/kota. Mulai dari Badan Intelejen Nasional (BIN) hngga BKKBN. Diharapkan vaksinasi bisa segera diselesaikan untuk mempersiapkan PTM bila nantinya kasus Covid-19 sudah semakin terkendali. **(nwh/mgs/ila/tar/wna/yve)**

Kualitas Pendidikan...

Sambungan dari hal 1

memiliki peran kunci. Keluarga harus paham tentang pembelajaran offline. "Kalau orang tua sibuk bekerja, ya cari seseorang yang bisa menggantikannya. Jangan malah nonton TV atau malah merokok. Hal-hal seperti itu memuat anak tentu *nggak* bisa konsentrasi," ujarnya.

Anak-anak, lanjut Dian, terutama usia dini, akan mengalami *the darkest effect of pandemic*, kalau tidak segera diantisipasi. Pandemi yang panjang ini sangat membekas dalam diri dan jiwa mereka. Hal ini bebeda dengan orang tua yang sudah pernah mengalami masa-masa yang sulit.

"Anak-anak yang baru terlahir, baru mengenal hidup sedikit sudah mengalami pandemi. Oleh karena itu, anak-anaknya harus dijaga dan diantisipasi agar tidak tidak berdampak pada keterampilan sosialisasi, dan kecemasan-kecemasan caranya memandang dunia," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Sofyan Setyo Darmawan, meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY maupun Dinas Kesehatan membentuk semacam gugus tugas khusus memantau Pendidikan Tatap Muka (PTM), disertai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut Sofyan, langkah ini penting untuk meyakinkan masyarakat dan orang tua siswa terkait kesiapan PTM dari A sampai Z. "Sosialiasai PHBS ke putri putri kita ke sekolah sangat tepat sekali, yang selama satu tahun ini menjadi pemahaman bersama," kata dia.

Kamar Kos Kosong

Dampak pandemi juga dirasakan berat menghantam usaha kos di Yogyakarta. Salah seorang pemikik usaha kos, Mujiono Pramujo, mengaku sangat merasakan dampak pandemi yang disusul dengan kebijakan pembelajaran *online* atau peniadaan PTM.

Muji yang pensiunan pegawai di UGM ini punya dua kos. Di Pandeansari, dia punya kos dengan 20 kamar. Sedangkan di kampung Pandean Condongcatur, ada satu rumah kos dengan 25 kamar.

Namun sejak tahun lalu, rumah kosnya hanya terisi sekitar 50 persen. Sebagian besar mahasiswa yang menghuni kos memilih pulang ke kampug halaman lantaran tidak bisa kuliah secara luring.

"Bertahap, banyak anak kos yang memilih pulang ke kota atau kampung halaman. Ya itu wajar karena di sini juga *ngapain gak* bisa kuliah," katanya.

Penghuni kos yang masih bertahan, katanya, lantaran karena tidak diperbolehkan pulang oleh keluarga. Berbagai macam alasan menjadi penyebabnya. Ada yang lantaran kota atau daerah asal masuk pada kategori zona merah Covid-19. Ada juga yang enggan melakukan perjalanan karena ketatnya aturan mengenai PPKM dan pemeriksaan kesehatan untuk calon penumpang angkutan transportasi publik

Muji mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebagai pemilik usaha kos, dia hanya bisa berharap kondisi pandemi segera membaik dan pulih sehingga PTM bisa dilaksanakan sesegera mungkin.

"Kalau dibilang *ya* memang berat, mas. Saat ini, bisa dibilang saya gak bisa menabung uang hasil dari usaha kos. Hanya cukup untuk biaya pengganti listrik dan operasional. Tapi *ya* mau *gimana* lagi, semua merasakan hal yang sama. Jogja *kan* kota pendidikan, semua usaha terkait pasti kena dampaknya," katanya.

Selain banyak yang kosong, mahasiswa yang masih bertahan di kos pun tidak semua lancar dalam membayar sewa kamar kos. Banyak dari anak kosnya yang meminta dispensasi atau diskon biaya kamar kos.

"Banyak juga yang minta keringanan karena kondisi orangtua mereka di daerah asal juga sedang susah. *Ya* saya kasih diskon rata-rata 20 persen dari tarif normal. *Gakpapa*, yang penting mahasiswa tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan tenang," ungkapnya.

Senasib, dialami Ika, pemilik kos ekslusif Kokakos di Jalan Kaliurang Yogyakarta. Ika mengaku, di awal pandemi usaha kosnya masih berjalan normal. Namun seiring kebijakan pemerintah membatasi aktivitas masyarakat melalui PPKM dan kemudian disusul larangan pembelajaran tatap muka, penyewa kos miliknya terus menyusut.

Sepinya penyewa mulai dirasakan Ika sejak pertengahan tahun 2020. Enam kamar yang dia kelola biasanya penuh dengan anak kos, baik mahasiswa maupun pegawai atau karyawan. Namun mulai pertengahan tahun lalu, satu demi satu penyewa pamit.

Sebagian besar memutuskan pulang ke daerah asal dengan alasan tidak ada yang dapat dilakukan di Jogja. Untuk mahasiswa, mereka pulang karena tidak bisa kuliah tatap muka. Sedangkan pegawai atau karyawan banyak yang di PHK.

"Malah Juni lalu tidak ada satu pun kamar yang terisi. Kosong semua. Saya bahkan terpaksa merumahkan pegawai yang biasa membantu saya membersihkan kos," katanya.

Ika mengatakan, selama ini dia menyewakan kamar kos bulanan dengan tarif Rp 1.400.000 per bulan. Ika mencoba menggaet penyewa dengan menurunkan biaya sewa menjadi Rp 1.250.000 per bulan.

Tapi ternyata strategi ini tidak membawa pengaruh. Kebijakan larangan PTM membuat mahasiswa dari luar daerah memilih pulang ke daerah asal sampai batas waktu yang belum pasti. Sedangkan penyewa dari kalangan karyawan atau pegawai juga banyak yang belum kembali lantaran kondisi ekonomi yang berat. Bahkan banyak dunia usaha yang menutup usahanya karena tidak sanggup menanggung biaya operasional di tengah sulitnya situasi karena pandemi.

"Sekarang ada dua penyewa. Keduanya karyawan. Masih lumayan. Tapi kalau kondisi seperti ini terus, sangat mungkin saya akan menutup usaha kos ini dan akan mencoba usaha yang lain," katanya. **(aro/rne/hul)**

Gonjang-ganjing Rencana Kenaikan Cukai Rokok

Ibarat Kabar Duka, Serikat Pekerja DIY Tegas Menolak

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Rencana pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 20 persen pada tahun 2022 tak hanya membuat gaduh pihak-pihak yang terkait sektor industri tembakau tetapi juga dikhawatirkan menimbulkan gonjang-ganjing.

Penolakan secara tegas salah satunya datang dari Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (PD FSP RTMM-SPSI) DIY. Waljid Budi Lestarianto selaku pengurus organisasi itu, Rabu (18/8/2021), menjelaskan kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau atau cukai rokok merupakan upaya pemerintah meningkatkan pendapatan negara. Apabila target penerimaan cukai tercapai mampu memompa penerimaan negara.

Di dalam Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 disebutkan pemerintah menargetkan penerimaan cukai tahun depan sebesar Rp 203,92 triliun. Angka tersebut tumbuh 11 persen dari *outlook* tahun 2021.

Jika benar, kata Waljid, ini merupakan kabar duka bagi para pekerja/buruh anggota FSP RTMM khususnya sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT) padat karya yang tersebar di empat kabupaten dan satu kota di DIY. "Jumlahnya sekitar 5.000 pekerja," ujar Waljid, Rabu (18/8/2021).

PD FSP RTMM-SPSI DIY meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan ulang rencana kenaikan Cukai Hasil Tembakau. Ini sangat memberatkan SKT yang banyak menyerap tenaga kerja.

"Apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini. Pasti akan sangat berdampak negatif bagi penghidupan ribuan pelinting SKT anggota FSP RTMM-SPSI DIY," ucapnya.

Ssebagian besar anggota serikat pekerja sektor ini adalah perempuan pelinting kretek. Mayoritas dari mereka merupakan tulang punggung keluarga.

Dikhawatirkan mereka terancam kehilangan pekerjaan lantaran permintaan pasar terhadap produk SKT menurun seiring kenaikan cukai yang tinggi ditambah berkurangnya daya saing terhadap rokok yang diproduksi mesin.

"Jika terjadi PHK, bagaimana nasib mereka? Siapa yang akan mempekerjakan mereka kembali. Siapa yang akan menyekolahkan anak-anak mereka?" kata dia.

Menurut Waljid, pada situasi saat ini pekerja/buruh industri masih tetap produksi, itu sudah baik. Pemerintah jangan membuat kegaduhan baru dengan menaikkan Cukai Hasil Tembakau saat masa prihatin karena dampak Covid.

ISTIMEWA

Pekerja pabrik rokok.

Diakhawatir pemulihan sektor perekonomian di sekitar lokasi produksi IHT ikut terdampak bahkan terhambat karena kenaikan Cukai Hasil Tembakau. "PD FSP RTMM-SPSI DIY tegas menolak rencana kenaikan Cukai Hasil Tembakau tahun 2022," tandasnya.

Kontra-produktif

Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok dinilai sebagai langkah yang kontra produktif alias tidak mendukung keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dan semakin melemahkan gerak ekonomi masyarakat pada masa pandemi.

Menanggapi itu, Endro Guntoro selaku perwakilan Masyarakat Konsumen Tembakau (Maskot) dan Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), berharap pemerintah lebih memperhatikan suara masyarakat di lapangan. Bagi mereka, kenaikan tarif cukai rokok akan mengerek harga jual eceran (HJE) rokok ke konsumen. Situasi sulit yang diakibatkan oleh kenaikan tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh konsumen, namun juga masyarakat secara luas.

"Kalau negara tidak memperhatikan suara konsumen, bisa rontok negara ini. Kekuatan tembakau itu salah satunya adalah di masyarakat. Jika konsumen menjadi kesulitan karena cukai rokok terus naik, HJE terus naik, maka itu sama saja dengan membunuh pedagang kecil, UMKM dan tidak memberi ruang industri kreatif untuk tumbuh," ujar Endro.

Dia berharap agar pemerintah jangan hanya fokus pada berbagai pembatasan, peraturan atau perundang-undangan, tanpa mendengar masukan dari berbagai pihak secara merata, termasuk dalam hal ini konsumen produk hasil tembakau, petani, buruh, pedagang mikro, makro hingga industri.

Pemerintah sebagai pengambil keputusan, menurut Endro, tidak melihat persoalan tembakau secara utuh. Padahal, mata rantai IHT, termasuk konsumen terus menerus menunjukkan ketaatan yang baik.

"Cukai rokok dinaikkan terus, industri dan konsumen mengikuti. Pembatasan ruang iklan, ruang merokok, dan lain-lain, lagi-lagi industri dan konsumen tetap taat. Padahal jelas ada asas-asas tidak berkeadilan. Kami sebagai konsumen berupaya menyuarakan keluh kesah kami lewat ruang-ruang diskusi," ungkapnya.

Koordinator KNPK, Mohammad Nur Azami, menegaskan rencana tersebut menunjukkan pemerintah tidak mempertimbangkan daya beli konsumen.

"Pemerintah harus realistis, lihat kondisi masyarakat di lapangan. UMKM khususnya pedagang mikro butuh pompa ekonomi, sementara daya beli masyarakat mulai lesu. Konsumen jangan lagi dipersulit dengan wacana kenaikan cukai," ujar Azami.

Seperti diketahui, tarif cukai rokok dikabarkan kembali naik pada tahun depan, seiring dengan tingginya target penerimaan negara yang dipatok tumbuh 10,89 persen. Padahal, kenaikan tarif cukai rokok baru saja dikerek naik tahun ini sebesar 12,5 persen. Pemerintah tengah melakukan kajian kenaikan tarif cukai rokok 2021 tersebut. Hasil kajian akan disertakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Lebih lanjut Azami memaparkan ketika pemerintah menerapkan kebijakan cukai rokok yang eksesif kepada IHT, maka sebenarnya yang sedang ditekan tidak hanya industri namun juga konsumen.

"Ketika konsumen membayar cukai, kami telah menunaikan kewajiban. Di sisi lain, hak kami ditiadakan. Konsumen sudah memberi banyak ke pemerintah. Jujur saja, cukai tembakau masih jadi andalan khususnya di tengah pandemi Covid-19. Tolonglah, kami jangan dibebani. Pengeluaran sudah naik, tapi UMR tidak naik," ucapnya.

Saat ini tidak sedikit pabrikan yang mengurangi tenaga kerja. Begitu juga industri kreatif seperti periklanan, dan transportasi sudah merasakan dampak pandemi.

"Di hilir, ada UMKM baik retail tradisional maupun modern yang sudah terpukul. Dengan daya beli konsumen yang menurun, siapa yang mau beli rokok? Kondisi ini juga harus diwaspadai karena akan menyuburkan rokok ilegal," kata Azami.

Semakin sulit

Menanggapi rencana kenaikan cukai rokok, Ketua DPC Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, Samukrah, menyatakan cukuplah petani tembakau berhadapan dengan tantangan iklim atau cuaca. Jangan lagi mereka didera dengan kebijakan itu.

Samu mengatakan, rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau alias cukai rokok pada 2022 diyakini akan menyulitkan petani tembakau dan cengkeh. Rencana kenaikan cukai rokok tidak serta merta diikuti naiknya harga jual komoditas bahan baku rokok yang dapat mengerek kesejahteraan petani.

Petani terus berjuang untuk bertahan hidup pada masa pendemi. Pada saat bersamaan, mereka juga menghadapi berbagai tantangan mulai dari kondisi cuaca, penurunan permintaan hasil panen, hingga bantuan subsidi pupuk maupun alat produksi yang belum merata.

"Rencana kenaikan cukai oleh pemerintah hanya akan menurunkan permintaan daun tembakau dan cengkeh oleh pabrikan rokok, serta berdampak pada pengurangan jam kerja dan upah buruh. Pabrikan rokok juga pada akhirnya akan mencari tembakau dan cengkeh dengan harga semurah-murahnya," kata Samukrah.

Paguyuban petani tembakau di Pamekasan maupun Sumenep di Pulau Madura, berharap pemerintah mampu secara cermat menganalisis dampak kenaikan cukai.

"Mata pencaharian petani di Pamekasan utamanya tembakau. Tidak ada pilihan lainnya, kami tetap jalan terus. Tembakaulah harapan kami. Artinya, kalau kebijakan pemerintah tidak berpihak, sudah pasti kami akan sangat sengsara," ungkapnya.

Kondisi harap-harap cemas juga dialami petani Temanggung Jawa Tengah. Ketua DPC APTI Temanggung, Siyamin, berharap pemerintah tidak lagi menaikkan tarif cukai rokok pada tahun depan. Kenaikan tarif cukai pada 2021 saja sudah menyulitkan kondisi petani.

"Setiap tahun kami sudah babak belur sekali. Mohon pemerintah jangan lagi menaikkan cukai. Bantu agar jerih payah kami dihargai. Kami sangat stres dan kecewa berat dengan kondisi saat ini," ujar Siyamin.

Dia mengakui, hingga pertengahan Agustus 2021 petani Temanggung masih diliputi ketidakpastian penyerapan hasil panen tahun ini. "Berikan kami kesempatan memulihkan kondisi ekonomi di tengah Covid-19. Sampai saat ini, kesejahteraan petani tidak kunjung membaik, ketidakjelasan situasi makin memberatkan petani," harapnya.

Kekhawatiran serupa disuarakan Ketut Nara, perwakilan petani cengkih asal Buleleng Bali. Dihubungi terpisah, Ketut Nara menegaskan petani juga berharap pemerintah tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2022 karena hal ini akan berdampak pada penurunan serapan cengkih.

Apalagi mengingat sejak tahun lalu produktivitas cengkih trennya menurun. Seperti yang dialami para petani di Desa Selat Kecamatan Sukasada Buleleng Bali, di mana hasil panen raya tidak maksimal **(aro/sol)**

Susahnya Mengakses Dana Cukai Rokok

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Dana Bagi Hasil Cukai - Cukai Hasil Tembakau (DBHC-CHT) tidak sedikit jumlahnya. Bagi pekerja dan buruh pabrik rokok DIY, dana tersebut sepertinya susah diakses. Mereka sudah menyuarakan keinginan merekaagarbisamerasakan yang dialokasikan ke provinsi ini sebesar Rp 10 miliar. Pada situasi seperti saat ini dana tersebut sangat berarti.

Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (PD FSP RTMM) DIY, Waljid Budi Lestarianto, menyebutkan penggunaan dana itu sepenuhnya mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 serta PMK Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

"Kami berharap pemda bisa merealisasikan. Patuhi saja PMK 206 Tahun 2020. Kamitidakmemintatetapidi situ disebutkan secara jelas antara lain untuk fasilitasi pekerja buruh pabrik rokok DIY," ungkapnya kepada wartawan, Jumat (6/8/2021).

Di dalam PMK juga sudah disebutkan secara rinci alokasinya yaitu untuk kesehatan 25 persen, penegakan hukum terkait rokok ilegal 25 persen.

Selebihnya 50 persen dibagi dua yaitu 15 persen untuk peningkatan kapasitas SDM petani tembakau dan pekerja buruh pabrik rokok DIY dan 35 persen untuk bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan modal petani tembakau dan pekerja buruh pabrik rokok.

ISTIMEWA

Suasana kerja di pabrik rokok.

Dari Rp 10 miliar itu, kata Waljid, sejumlah Rp 3 miliar untuk Provinsi DIY, Rp 2,3 miliar untuk Kabupaten Bantul, Sleman Rp 1,7 miliar, Kulonprogo Rp 1,1 miliar, Gunungkidul Rp 1 miliar dan Kota Yogyakarta Rp 765 juta.

"Karena disebut dalam PMK kami dari pekerja dan buruh pabrik rokok sebagai mitra menyampaikan ke Disnakertrans DIY, kemudian ditindaklanjuti," ucapnya.

Diperoleh informasi, untuk provinsi (Pemda DIY) dana tersebut diserahkan ke Dinas Kesehatan. Persoalannya adalah, jika digunakan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) kemungkinan besar tidak tersalurkan. Sebagian pekerja sudah memperoleh bantuan sosial (bansos) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Mengingat anggaran BLT itu tidak bisa diberikan kepada buruh dan pekerja pabrik rokok maka ditambahkan ke sektor kesehatan sehingga alokasinya mencapai lebih dari 50 persen.

"Kami sudah memohon ke Disnaker tolong beritahu Dinas Kesehatan, bisa nggak memprogramkan dana itu untuk fasilitasi kesehatan pekerja dan buruh pabrik rokok misalnya bantuan vitamin, vaksin atau apa," ungkapnya.

Sebagai sektor padat karya, dia mengakui, pekerja pabrik rokok rentan kerumunan. Di DIY sendiri tercatat tidak kurang 4.500 orang yang bekerja di pabrik rokok.

"Tuntutan kami adalah mohon patuhi PMK. Pada masa pandemi ini buruh berhak atas perlindungan kesehatan. Toh sudah ada alokasi anggaran," ucapnya.

Anggota Komisi A DPRD DIY, Stevanus Christian Handoko, menyatakan seharusnya Pemda DIY segera membagi dana tersebut sesuai peruntukan, persentase dan kontribusi masing-masing darah. Selanjutnya, kabupaten/kota harus bisa memanfaatkan dana tersebut sesuai peruntukan, berbentuk program peningkatan produksi dan SDM.

"Setahu saya untuk kesehatan, pengembangan produksi, SDM, sosialisasi. Bagaimana petani bisa panen dan hasilnya meningkat. Dana bagi hasil cukai tembakau itu kembali lagi ke sektor yang bersangkutan, sesuai besaran persentase," kata dia.

Kepala Bappeda DIY, Beny Suharsono, sepakat penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau tersebut akan disesuaikan peruntukannya. Artinya, sesuai aturan yang berlaku. **(sol)**

Logam Besar Tertanam di Punggung Selama 15 Tahun

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Rini Pujilestari sedikit lega, sehabis menjalani operasi di RSA (Rumah Sakit Akademik) UGM kawasan Ring Road Utara Sleman, Juni 2021. Wanita berusia 41 tahun ini tak lagi harus menggendong logam platina besar dan berat yang tertanam di punggungnya. Benda itu sudah 15 tahun bersemayam di sana, agar dia bisa duduk dengan punggung tegak.

Ketika musibah gempa besar melanda DIY dan sekitarnya 27 Mei 2006, itulah penderitaannya bermula. Rumahnya di Jetis RT 30 RW 08 Kelurahan Sorosutan Yogyakarta roboh, senasib dengan rumah-rumah di sekitarnya. Secara insting sebagai ibu, Rini begitu dia biasa disapa ngrungkepi Bagas Ryan Saputra, anak keduanya yang saat itu berusia 14 bulan.

Bagas memang selamat setelah dievakuasi Yanto, ayahnya. Namun kedua tangan Rini patah. Lebih fatal lagi, tulang punggungnya patah tertimpa tembok dan genteng. Praktis dia tak mampu lagi duduk karena tak lagi punya tulang penyangga.

Untung, operasi pun bisa segera dilakukan dan sejak itu dia harus duduk di atas kursi roda. Sementara bagian pusar ke bawah syarafnya mati. Sama sekali tidak berfungsi.

ISTIMEWA

Rini Pujilestari bersama keluarganya.

Beruntung, dia bisa dirawat di YAKKUM Pakem Jalan Kaliurang Sleman.

Di tempat itu Rini dan korban gempa lainnya tidak cuma dirawat dan diobati tetapi dididik mandiri. Mengurus diri sendiri, masak, mencuci, membersihkan kamar dan lingkungannya. Juga diajar membuat kerajinan, dengan harapan setelah keluar dari YAKKUM tidak harus bergantung pada orang lain.

Sedang anak sulungnya, Adelia Riana Putri yang biasa dipanggil Dela selamat. Karena Allah "menempatkannya" di sebuah runtuhan bangunan berbentuk lorong. Kemudian diselamatkan Widayanto, ayahnya.

Bukan tanpa kendala

"*Alhamdulillah* Rini di rumah bisa menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya. Memasak, mencuci bahkan menjemur pakaian dia juga bisa. Menggunakan galah untuk mencantolkan di tempat jemurannya," kata Ny Jumiyem Narnosuwito, ibunya Rini kepada *koranbernas.id* di rumahnya beberapa hari usai Rini pulang dari operasi.

Tetapi bukan berarti tanpa kendala. Dalam perjalanannya punggungnya sering luka. Berair. Sakit sekali. Berkali-kali Rini keluar-masuk rumah sakit.

Beruntung keluarga Yanto, karyawan swasta itu punya kartu jaminan kesehatan. Kalau tidak, dari mana dia bisa membayar biaya rumah sakit yang memang mahal.

Operasi terakhir, menurut Yanto, dilakukan tim yang dipimpin Dr Adam Mulyono SpOT (K) dengan melibatkan dokter ahli jantung, ahli penyakit dalam, ahli paru dan yang terkait. Bisa dibayangkan kalau harus bayar, berapa? Juga dari mana uangnya?

"Memang tidak seluruhnya tertutup dana kesehatan. Tetapi syukur, hampir semua gratis. Saya hanya membayar infus Rp 2,5 juta. *Alhamdulillah* bisa saya pinjamkan dari uang yang saya cadangkan untuk biaya sekolah Bagas," kata Yanto.

Dia bersyukur ada uang itu. Seandainya tidak, dia masih bisa berharap pinjam Endy, adiknya. Padahal menjelang operasi, HB Rini sangat rendah sehingga harus transfusi darah.

Kalau dirupiahkan, berapa lagi? Dia juga merasa berterima kasih sekali, pelayanan di RSA UGM sangat bagus meski untuk pasien tidak bayar.

Operasi memang sudah selesai. Platina sudah diambil. Tetapi bukan berarti semua derita berakhir. Rini harus bersabar. Dia belum bisa duduk sendiri. Masih harus belajar.

Mungkin jalan terbaik, tempat tidurnya akan dipasang stainless steel, besi tahan karat yang biasa dipakai pegangan kaum difabel di tempat-tempat umum itu. Waktu itu masih menunggu dana. Entah dari mana.

Namun demikian wanita berkulit hitam manis ini sangat bersyukur. Dalam keadaan keuangan pas-pasan untuk hidup sehari-hari, Allah tetap memberikan kemudahan. Coba kalau tidak, apakah mungkin rumah tinggal milik ayah mertuanya, Wiji, yang kesehariannya menjadi penjual angkringan harus dikorbankan?

Dia juga bersyukur pada masa pandemi saat banyak sekali orang kehilangan pekerjaan, suaminya masih tetap dipekerjakan.

Bagas yang dulu masih belajar jalan kini sudah sekolah di SMK Negeri 5 belakang pabrik Sari Husada. Sedang Dela yang usianya hanya sedikit di atas Bagas, sudah kelas akhir di salah satu SMK.

Mereka sangat menyayangi ibunya. Demikian juga Yanto begitu sayang pada Rini. Sore itu *koranbernas.id* berkunjung ke sana, Yanto baru saja memandikan Rini. Kamar Rini bersih beraroma wangi. **(ato)**

ISTIMEWA

Platina yang selama 15 tahun tertanam di punggung Rini.

Persiapkan PTM, DIY Simulasi Guru

KORANBERNAS.ID -- Pemda DIY tengah mempersiapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Kebijakan ini akan diterapkan bila penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di propinsi ini nantinya turun dari Level 4.

Untuk mempersiapkan kegiatan belajar mengakar di sekolah, Pemda menggelar simulasi PTM. Simulasi kali ini khusus diperuntukkan bagi guru dan tenaga kependidikan di seluruh sekolah

Simulasi dilaksanakan pada 24 Agustus hingga 2 September mendatang. Namun maskimal hanya 25 persne guru atau tenaga kependidikan yang diperbolehkan mengikuti simulasi di sekolah.

"Tapi simulasi itu bukan murid lho ya, [tapi] gurunya menyiapkan ptm]," ujar Sekda DIY, Baskara Aji di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (24/08/2021).

Dalam simulasi PTM ini, para guru dan tenaga kependidikan harus mempersiapkan program Asesman Nasional. Program ini dilaksanakn untuk penilaian mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).

Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar. Mulai dari literasi, numerasi hingga karakter. Assemen juga dinilai dari kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. "Simulasi tersebut bisa menjadi persiapan saat PTM boleh diberlakukan di DIY," jelasnya.

Aji menambahkan, saat ini sekitar 17 ribu pelajar di DIY sudah mengikuti vakasinasi sebagai persiapan PTM. Dengan batas usia 12-17 tahun, cakupan vaksinasi pada saat ini sekitar 5,46 persen dari total sasaran vaksinasi pelajar di DIY yang berjumlah 311.596 orang. Untuk vaksinasi dosis pertama sudah diberikan kepada sebanyak 46.715 siswa.

Pelajar menjadi sasaran prioritas vaksinasi Covid-19 bersama dengan kelompok prioritas lain meliputi tenaga kesehatan, pelayan publik, kelompok rentan, difabel dan masyarakat umum.

Di DIY, cakupan vaksinasi dosis pertama di DIY secara keseluruhan telah mencapai 48,82 persen atau 1.405.944 orang dari total sasaran berjumlah 2.879.699 orang. Sedangkan sebanyak 575.623 orang atau 19,99 sasaran sudah divaksin dosis kedua.

Secara terpisah Ditempat terpisah, Ketua Komisi 4 DPRD Klaten Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Edy Sasongko mengemukakan pada prinsipnya Komisi 4 mendorong segera dilaksanakan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) pada PPKM darurat. Namun satgas penanganan Covid-19 belum mengijinkan.

"Semua sekolah oke tatap muka, orang tua juga. Sejak awal 83 persen sudah setuju dilakukan PTM. Tapi tidak diijinkan satgas," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Untuk SD kata dia, 92 persen sekolah sudah siap PTM dan SMP 98 persen. Sarpras prokes seperti tempat mencuci tangan sudah ada, guru dan SDM lainnya juga sudah divaksin.

Kalau PJJ ujarnya, anak-anak tidak bisa dikontrol. PJJ sudah berlangsung lama dan bisa-bisa kata dia, anak-anak lulus tanpa mengenali kepala sekolah, guru dan teman-temannya.

MASAL GURUSINGA/KORAN BERNAS

Sejumlah siswa mengikuti PTM Terbatas di Klaten.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Klaten, Dr Wardani Sugiyanto mengungkapkan selama PPKM darurat level 4 pembelajaran dilakukan secara zoom. Karena sampai saat ini kasus Covid-19 di Klaten cenderung turun maka dia berharap akhir bulan ini kondisinya sudah baik.

"Kemarin juga kita layangkan surat perpanjangan PPKM darurat sampai tanggal 23 Agustus. Mudah-mudahan September sudah baik," katanya.

Mantan Kepala SMK Negeri 2 Klaten dan SMK Negeri Trucuk itu menambahkan hingga saat ini semua sekolah di berbagai jenjang pendidikan di Klaten tetap berjalan seperti biasa dan eksis. "Sekolah eksis semua," ujarnya singkat.

Sementara Dirjen PAUD Dikdasmen Kemdikbud Jumeri mengapresiasi langkah SMP Negeri 1 Jogonalan yang memperbolehkan anak didik yang terkendala masalah di PJJ untuk belajar dengan fasilitas sekolah.

Sementara Kepala Sekolah SMA N 1 Pakem, Kristyo Mintarjo mengaku SMA N 1 Pakem selama PPKM ini juga menerapkan PJJ sesuai aturan Pemerintah. Selain embelajaran daring klasikal, bisa buka konsultasi pembelajaran via daring juga. Guru melayani/membantu siswa yang mengalami kesulitan secara pribadi

SMA N 1 Pakem juga membuat modul pembelajaran sehingga siswa bisa belajar mandiri dan jika mengalami kesulitan bisa melakukan konsultasi ke guru mata pelajaran meskipun tetap via daring. Untuk tahun ajaran 2021/2022 dan dimasa pandemi jumlah siswa baru di SMA N 1 Pakem tidak mengalami penurunan.

"Jumlah siswa barunya sesuai kuota. Sekolah negeri 36 per kelas dan ini bisa terpenuhi," katanya.

Ditambahkan Kristyo, kalau pemerintah sudah mengijinkan pembelajaran tatap muka, SMA N 1 Pakem siap melakukan pembelajaran tatap muka. Bahkan lanjut Kristyo, sebelum diberlakukan PPKM, SMA N 1 Pakem sudah melayani konsultasi belajar dengan menerapkan protokol kesehatan. Sedang Rangga warga Godean yang menjadi siswa baru di salah satu SMP Moyudan dengan pembelajaran daring pada awalnya mengaku senang-senang saja, namun lama kelamaan merasa bosen.

"Saya belum ketemu teman-teman secara langsung karena sejak awal masuk sekolah sudah pembelajaran daring. Semoga sekolah segera bisa dilakukan tatap muka," kata Rangga. **(ila/yve/mgs).**

Terapkan PPKM Level 3, Disdikpora Purworejo Izinkan PTM Terbatas

KORANBERNAS.ID -- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 425/1382/2021/ tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19 level 3 tentang konsultasi terprogram atau Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, pada (19/8/2021). SE tersebut sebagai acuan untuk Paud/TK/SD dan SMP untuk menyelenggarakan konsultasi terprogram atau PTM terbatas.

Melalui SE tersebut, sekolah di Purworejo akhirnya diperbolehkan menggelar PTM terbatas. Kebijakan ini pun disambut baik sejumlah sekolah di kabupaten tersebut.

Kepala SMPN 6 Kabupaten Purworejo, Teguh Widodo mengatakan sekolah yang dipimpinnya akan melaksanakan SE. Sekolah pun mengadakan kesepakatan untuk memulai konsultasi terprogram atau PTM terbatas pada Senin (23/8/2021) lalu.

"Kami menyelenggarakan konsultasi terprogram atau PTM terbatas, untuk 50 persen siswa. Setiap siswa berkesempatan mendapatkan materi selama 4 jam, dengan istirahat selama 15 menit," jelas Teguh.

Menurutnya, untuk menghindari kerumunan, selama istirahat siswa tetap berada dikelas, dan membawa bekal sendiri. Sejumlah persiapan internal pun dilakukan seperti menyediakan 1 meja dan 1 kursi untuk 1 siswa. Untuk mendukung protokol Kesehatan, pihaknya sudah memasang tempat cuci tangan dibanyak tempat.

Siswa baru kelas 7 pun tidak kesulitan mencari kelas. Sebab siswa kelas 7, sudah mengenal sekolah saat mereka pendaftaran dan daftar ulang.

"Setiap kelas akan diisi 50 persen dari 32 siswa perkelas. Jadi selama PTM terbatas ada 16 siswa per kelas," sebut dia.

Jam pelajaran akan dimulai pukul 07.30 wib sampai selesai selama 4 jam dengan durasi antara 30-35 menit. , untuk jam ada 7 jam pelajaran.

Hal yang sama diutarakan Kepala SMPN 1 Kabupaten Purworejo, Sutarto. Sekolah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung untuk penerapan PTM Terbatas.

"Kami membeli alat pengukur suhu badan baru. Begitu anak-anak datang diukur suhu, setelah itu anak-anak melanjutkan cuci tangan di dekat pintu gerbang," jelas Sutarto.

Dia melanjutkan pihak sekolah juga telah menyiapkan tempat cuci tangan didepan setiap kelas, lengkap dengan sabun dan hand sanitizer. Sekolah pun tidak mengijinkan siswa menaiki kendaraan umum.

"Untuk itu orang tua atau keluarga harus melakukan antar jemput ke sekolah. Selama pandemi Covid-19, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum darurat," jelasnya.

Sementara itu Kabid SMP Dinas Dindikpora Kabupaten Purworejo, Frikly Widhi Dewanto mengatakan pihaknya sudah melaksanakan amanat Intruksi Bupati (Inbup) Nomer 5531 tahun 2021 tentang PPKM Covid-19 level 3.

Namun bagi sekolah yang belum siap melaksanakan SE kepala Dinas itu, bisa tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan. Bagi satuan pendidikan yang sudah siap dan memiliki sarana dan prasana dipersilahkan melaksanakan konsultasi terprogram atau PTM terbatas 50 persen

SE 425/1382/2021 tersebut berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta tanpa kecuali. Saat proses PTM terbatas, sekolah wajib memperketat protokol kesehatan. **(wna)**

UMBY Kembangkan Pembelajaran Menyenangkan

ISTIMEWA

Mahasiswa KKN UMBY di Tegalsari, Temon, Kulonprogo membuat metode "Sesi Belajar Menyenangkan" yakni belajar di alam terbuka.

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Pembelajaran secara daring di masa pandemi bisa menimbulkan rasa jenuh di kalangan siswa. Termasuk mereka yang berada di jenjang SD. Maka agar pembelajaran menjadi lebih nyaman bagi anak, mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) kelompok 17 yang sedang KKN di Tegalsari,Temon, Kulonprogo membuat metode yang dinamai "Sesi Belajar Menyenangkan".

Kepala Humas UMBY, Widarta MM, dalam rilis yang dikirim ke redaksi koranbernas.id, Selasa (24/8/2021), mengatakan pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat meminimalisir segala bentuk kegiatan yang mengharuskan untuk melakukan aktifitas di luar rumah. Tidak terkecuali kegiatan belajar mengajar yang juga dialihkan ke rumah masing-masing.

"Dua tahun bukanlah waktu singkat. Berbagai jenis usaha telah dilakukan untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi belajar yang baru ini. Tidak dapat dipungkiri, melaksanakan pembelajaran dari rumah dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan, terlebih anak-anak dengan rentang usia sekolah dasar, di mana pada usia tersebut mereka masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga belajar, bermain, dan segala bentuk interaksi yang dilakukan secara langsung sangatlah krusial untuk menstimulus pertumbuhan dan perkembangan fisik, juga psikologis terutama mental dan emosional," kata Widarta.

"Melihat kasus di lapangan, semenjak proses pembelajaran dialihkan ke rumah menggunakan metode daring, anak-anak di Dusun Tegalsari lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget. Oleh karena itu kelompok KKN 17 UMBY mencetuskan sebuah program kerja pada bidang pendidikan. Program tersebut dinamai Sesi Belajar Menyenangkan," tambahnya.

Program ini diselenggarakan bekerja sama dengan komunitas Jogja Astro Club (JAC) yang merupakan salah satu komunitas atau klub astronomi amatir yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaan sesi belajar menyenangkan bersama Jogja Astro Club ini dibagi menjadi dua kali pertemuan yang berlokasikan di ruang terbuka.

Sementara Ketua KKN 17, Dwina Rachma Hidayat, menambahkan pada pertemuan pertama agenda kegiatan yang dilaksanakan adalah mengamati matahari bersama anak-anak menggunakan teleskop berjenis refraktor yang merupakan property Jogja Astro Club.

Anggota kelompok KKN 17 UMBY didampingi Agung Laksana selaku ketua Jogja Astro Club dan anggotanya, Anggit, mendampingi anak-anak pada rentang usia sekolah dasar untuk mengamati juga melihat matahari dengan lebih jelas. Selain itu juga membuat eksperimen sederhana yakni membakar dedaunan dari pantulan cahaya matahari yang dihasilkan teleskop.

Sedangkan pada pertemuan kedua, agenda kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan praktik membuat roket air sederhana.

"Proses pembuatan roket air ini kami pilih karena terdapat proses belajar yakni memuat banyak unsur dan prinsip sains sederhana dalam pengaplikasiannya. Juga dapat dibarengi dengan kegiatan bermain ketika roket siap diluncurkan bersama-sama," katanya.

Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan roket air juga sangat mudah ditemui di rumah masing-masing. Sehingga secara tidak langsung ini juga mengajarkan untuk melakukan kegiatan daur ulang sampah botol plastik menjadi sesuatu yang lebih menarik, bermanfaat, serta dapat menjadi media belajar yang mengasyikkan.

"Karena menyenangkan dengan tidak memakan budget mahal bukan?," lanjutnya.

Dukuh Sajulianta melihat kegiatan tersebut menyenangkan, sangat menarik. Sehingga anak-anak lebih bersemangat dan antusias ketika mengikuti kegiatan.

"Ini hal baru bagi anak-anak kami. Terima kasih kepada anak-anak KKN karena telah mengenalkan anak-anak dusun Tegalsari dengan banyak hal-hal baru dan menarik," tutur Sajulianta.

"Ya pokoknya saya senang sekali mengikuti kegiatan ini, karena bisa lihat matahari dengan lebih jelas, dan bisa bikin sama main roket bareng teman-teman dan kakak-kakak KKN," kata Burhan, salah satu anak yang mengikuti kegiatan dengan semangat dan antusiasme yang sangat tinggi. **(sra)**

Capai Kekebalan Komunal, Kampus Gelar Vaksinasi Massal

KORANBERNAS.ID – Sejumlah kampus menggelar vaksinasi. Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian herd immunity atau kekebalan komunal.

Sebut saja Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang menggelar vaksinasi untuk civitasnya, pekan lalu. Vaksinasi kali ini ditujukan kepada dosen, pegawai dan keluarga pegawai, mahasiswa, serta alumni UMY.

Agenda yang digelar untuk kedua kalinya ini kembali menyediakan 2.000 dosis pertama vaksin. Masih sama sepertivaksinasi pertama, agenda vaksinasi kedua ini kembali dilaksanakan dengan sistem drive thru tanpa melalaikan penerapan protokol kesehatan.

"Vaksin yang digunakan kali jenis vaksin Sinovac," ujar Rektor UMY, Gunawan Budiyanto disela acara.

Rektor meminta seluruh sivitas akademika UMY khususnya para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. Sebab hal ini merupakan bentuk konkrit ikhtiar untuk mengurangi penularan virus Covid-19, terlepas dari apapun jenis vaksin yang digunakan.

"Tidak perlu lagi kita berdebat tentang manjur atau tidaknya vaksin, ini semua sudah melalui riset dan penelitian. Yang jelas, pemerintah sudah memberikan dukungan penuh terkait penjagaan kesehatan masyarakat," imbuhnya.

Kegiatan vaksinasi ini kembali terlaksana atas kerjasama UMY dengan Polda DIY. Kepala Urusan Operasional Polda DIY, Kombes Istiyono mengungkapkan para mahasiswa menjadi salah satu target utama vaksinasi karena memiliki mobilitas yang sangat tinggi.

"Pergerakan mahasiswa ini sangat tak terduga, apalagi di Yogyakarta mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia," terangnya.

Sementara di UGM, sebanyak 1.100 ibu hamil menerima vaksinasi di Grha Sabha Pramana, Vaksinasi ini diselenggarakan atas kerjasama UGM dengan berbagai pihak, untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperluas sasaran vaksinasi dan menekan angka kematian akibat COVID-19.

"Akhir-akhir ini mortalitas ibu hamil meningkat, dan memang ibu hamil merupakan kelompok risiko tinggi sehingga perlu peningkatan daya tahan tubuh," terang Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, Ova Emilia.

Sebagai salah satu kelompok paling rentan, ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami perburukan dan memerlukan perawatan di ruang intensif, terlebih dengan masuknya varian Delta.

Salah satu upaya strategis yang dapat diambil, selain upaya preventif standar berupa pola hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan secara benar, adalah pemberian vaksinasi pada ibu hamil. Vaksinasi terhadap kelompok ibu hamil

YVESTA PUTU AYU/KORAN BERNAS

UMY menggelar vaksinasi bagi civitas akademika di kampus setempat, pekan lalu.

dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan yang ditetapkan pada tanggal 2 Agustus lalu.

"Rekomendasi POGI untuk segera dilakukan percepatan dan perluasan vaksinasi ibu hamil terutama yang tinggal di daerah transmisi infeksi tinggi atau tenaga kesehatan, ibu hamil risiko tinggi, atau ibu hamil risiko rendah setelah mendapat penjelasan dari petugas kesehatan dan bersedia melaksanakan vaksinasi," jelasnya.

Proses vaksinasi dimulai dari tahap pendaftaran, skrining, penyuntikan, dan observasi selama 15 menit. Proses skrining sangat penting untuk menapis ibu hamil agar tidak terdapat kontraindikasi terhadap vaksin sesuai dengan Surat Edaran dari Kemenkes, sementara proses observasi dilaksanakan untuk memantau kondisi pasca penyuntikan vaksin Covid-19. **(yve)**

Editorial

Sekolah

WALIKOTA Solo Gibran, Sabtu (21/8/2021) lalu mengutus ajudan dan sopir untuk memarkir mobil dinas di depan SMK Batik 2 Solo. Mobil ditinggal di depan sekolah. Rupanya, Gibran ingin memastikan agar sekolah menengah kejuruan itu tidak menggelar pembelajaran tatap muka. Memang beredar kabar, sekolah itu akan memulai PTM (Pertemuan Tatap Muka) dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Bukan hanya di Solo, sekolah berencana menyelenggarakan PTM. Di kota-kota lain hal yang sama terjadi. Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan atau Kota Pelajar juga melakukan hal yang sama. Berbagai tingkat satuan pendidikan, mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, rerata mempunyai keinginan yang sama. Segera dilakukan pertemuan tatap muka untuk transfer pengetahuan dari guru ke murid. Dosen ke mahasiswa.

Pembelajaran daring, sekolah menggunakan sarana internet, menimbulkan banyak persoalan di lapangan. Ada persoalan orang tua anak balita yang kerepotan melayani anak dalam belajar di PAUD, kepemilikan sarana telepon genggam yang terbatas dalam keluarga, jaringan internet yang susah diakses di tempat tertentu, sampai dengan guru yang susah mengaplikasikan model pembelajaran daring. Kebiasaan pembelajaran tatap muka yang sudah lama dijalani, tak bisa serta merta diganti model baru. Susah menyiapkan materi.

Sekolah. Dalam paradigma lama memang bermakna sebuah penyelenggaraan belajar-mengajar di suatu ruangan atau bangunan yang kemudian disebut sekolah. Kata ini juga berimplikasi makna peserta didik datang ke sekolah, bertemu dengan banyak teman, jajan di kantin sekolah waktu istirahat atau pulang sekolah dan seterusnya. Bagi rakyat Indonesia yang bukan penganut individualisme, relasi sosial, kumpul dengan teman adalah kebutuhan kehidupan jiwa yang tidak dapat ditanggalkan. Mutlak adanya. Harus dipenuhi.

Barangkali, itulah sebabnya pandemi Covid-19 masih merebak cukup kuat di masyarakat, karena memang kebutuhan berkumpul, bertemu dan bercanda sulit sekali dibendung. Protokol kesehatan tentu tak bisa ketat diterapkan. Pengendalian corona dipersulit dengan rendahnya literasi masyarakat tentang pandemi.

New normal. Kebiasaan baru, atau bahkan lebih luas lagi paradigma baru dalam dunia persekolahan sedang mencari bentuk. Semua dengan uji coba di lapangan yang mengandung risiko gagal. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau lembaga yang menyiapkan guru, tentu memiliki peran besar untuk mencari cara baru model pembelajaran yang efektif. Pemangku kepentingan lainnya, tentu juga dituntut memberikan kontribusi.

Upaya itu, mungkin memerlukan ongkos tidak murah. Boleh jadi sangat mahal. Tapi, itu harus dilakukan. Mereka yang berposisi sebagai pengambil kebijakan, tak boleh lena. Tak elok mengedepankan kepentingan kelompok dan individu. **

Rumah Tahan Covid-19?!

Oleh: Sudjito Atmoredjo

KALA pandemi Covid-19 semakin ganas dan meluas, keberadaan dan fungsi rumah (*house*), amat sentral. Diperintahkan kepada semua pihak, agar tinggal di rumah. Bekerja di rumah. Berkomunikasi dari rumah. Segalanya dari rumah sendiri, terhubung dengan kantor atau rumah orang lain.

Sungguh beruntung, orang yang memiliki rumah besar, halaman luas, taman indah, sarana komunikasi lengkap dan canggih. Rumah bisa dihuni banyak orang. Gelak-tawa, senda-gurau, berbagi kasih sayang, bisa berlangsung di rumah. Berbagai kebutuhan bisa didatangkan melalui komunikasi *online*. Seakan tiada permasalahan, walaupun pandemi Covid-19 menari-nari tiada henti. Barangkali rumah tipe besar ini dapat dikategorikan rumah tahan Covid-19.

Lain halnya, pada orang miskin, kurang beruntung, atau serba kekurangan. Rumahnya sempit. Anak-cucu, menantu, berjubel di ruang yang sama. Tak bersekat. Tanpa ventilasi, tanpa halaman, tanpa perputaran udara. Suasana pengap, dan panas. Secara fisik, segala gerak dan aktivitas serba terbatas. Hanya karena tebalnya modal kesabaran, disertai *jembare dada, lantipe akal*, dan *duga-prayoga*, kehidupan menjadi terkelola dengan baik, minim gesekan. Sungguh malang, ketika seorang penghuni positif Covid-19. Bagaimana mungkin isolasi mandiri di rumah sempit? Tak urung, semuanya terpapar juga. Dengan kata lain, rumah tahan Covid-19 sulit ditemukan pada orang-orang miskin.

Dalam perspektif spiritual-religius, dipertanyakan: "Benarkah rumah yang kita huni saat ini merupakan rumah sesungguhnya?" Kalau disadari bahwa kehidupan di dunia hanya sementara, dan ada kehidupan sejati di alam akhirat, maka pertanyaan dapat dimajukan, menjadi: "Di manakah rumah yang sesungguhnya berada? Bagaimana dapat memilikinya?"

Basis keimanan mengajarkan bahwa surga adalah rumah impian. Rumah masa depan. Rumah sejati. Rumah itu, dapat kita miliki sebagai hadiah Ilahi Robi. Di sanalah, puncak kebahagiaan berada. Segala kebutuhan terpenuhi. Syarat perolehan dan kepemilikannya, sungguh mudah. Taqwa. Patuhi segala perintah-Nya, jauhi segala larangan-Nya. Perbanyak amal saleh berfondasi keikhlasan. Segalanya diorientasikan semata-mata karena dan demi ridha Ilahi Robi. Itulah kunci pintu dan sertifikat rumah surga, baik surga dunia maupun surga akhirat.

Tetapi pada zaman modern, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sedemikian canggih, dogma tentang rumah surga sering dijadikan bahan olok-olok. Kuntowidjoyo (2006) menjelaskan bahwa awal kehidupan modern dapat dilacak pada momentum *Rainessan* di Eropa Barat, yakni peradaban baru yang mencoba keluar dari Abad Pertengahan. Ciri menonjol modernitas adalah lahir dan berkembangannya aliran antroposentrisme. Aliran filsafat ini memiliki semangat dan dogma, berupa: pengakuan, penghargaan, sekaligus dominasi nilai-nilai maupun realitas, yang dibangun oleh manusia sendiri.

Antroposentrisme dengan terang-terangan menolak (bahkan melawan) aliran filsafat teosentrisme. Patut diingat, bahwa pada Abad Pertengahan (dan sebelumnya), para ilmuwan dan agamawan (termasuk manusia pada umumnya), senantiasa meyakini keberadaan wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kebenaran. Doktrin keilmuan demikian diolok-olok oleh pelopor dan pengikut antroposentrisme. Dikatakan, sumber ilmu pengetahuan dan kebenaran yang bersifat abstrak (berdasarkan keimanan) tak sepantasnya diterima, karena tak masuk akal, sulit dicerna indera, sulit diverfikasi, tak mudah pembuktiannya.

Antroposentrisme terang-terangan memisahkan (melakukan diferensiasi) antara agama (termasuk wahyu) dengan realitas semesta (baik ekonomi, politik, hukum, budaya, dan lainnya). Sekulerisasi dilakukan pada semua aspek kehidupan. Sedemikian ganasnya sekulerasi itu, hingga seorang pemikir Islam (Roger Garaudy, 1982) menyebutnya sebagai "pembunuhan" terhadap Tuhan dan manusia (Kuntowidjoyo, 2006: 98).

Di jalan dan di alam proses pencarian rumah surga, aktivitas manusia, umumnya singgah di terminal rumah pencerahan (Prama, 2015). Sebagaimana istilahnya, pencerahan menghadirkan kehidupan yang cerah dan terang, jauh dari kegelapan, kebingungan, dan ketidaktahuan. Pertanyaannya, bagaimana orang bisa sampai di rumah pencerahan?

Caranya sederhana dan mudah. Identikan diri sendiri dengan tukang taman berpengalaman. Olehnya, semua rahmat Tuhan, berupa: tanah subur, bibit pepohonan indah, air, matahari, dan sebagainya, diracik dan dipadukan sedemikian rupa, dalam ukuran proporsional dan harmonis, sehingga seluruhnya tertransformasikan sebagai taman pencerahan. Rumah, dibangun dan didesain sebagai keutuhan taman pencerahan itu. Di dalamnya, suasana kehidupan serba teduh, indah, dan cerah. Mirip dengan pepohonan, ada bunga kamboja yang memerlukan sedikit air, ada bunga lotus yang memerlukan banyak sekali air. Ada pohon durian, dan ada pula pohon sawo. Masing-masing memiliki ciri-ciri unik yang layak dikenali, dan difasilitasi agar tumbuh sehat.

Keasyikan dan seni membangun rumah pencerahan, antara lain terletak pada upaya-upaya memfasilitasi perkembangan semua unsur menuju tingkat kesempurnaan. Tukang taman bijak, tidak pernah sekali-kali membuang sampah. Seburuk apapun suatu barang dikatakan sebagai sampah, mesti didaur ulang menjadi barang berharga. Misal, dedaunan diolah menjadi kompos. Pupuk kompos, ditanam di bawah pohon. Menjadikan pohon cepat besar, cepat berbunga, dan berbuah. Saatnya musim buah-buah tiba, maka rumah pencerahan bukan sekadar elok dipandang, tetapi juga lezat dilidah. Jiwa dan raga pun tumbuh sehat, lahir-batin. Secara bijak, kompos telah direntang sebagai "kemarahan, ketakutan, iri, dengki, congkak dan sejenisnya", kemudian ditransformasikan sebagai bunga-bunga pencerahan, berupa kasih-sayang.

Di dalam Islam, dikenal slogan *baitii jannati* (rumahku adalah surga bagiku). Hakikat rumah (*home*), bukanlah bangunan fisik semata, tetapi lebih tertuju pada pengertian kemanusiaan, utamanya suasana interaksi dan keberkahan hidup yang dirasakan semua anggota keluarga, sebagai kebahagiaan. Fungsi kemanusiaan ini, tidak semestinya dialihkan ke tempat atau pihak lain. Sekolah atau guru misalnya, bukanlah ganti rumah surga dunia, melainkan sebagai pelengkap peran bapak dan ibu sebagai pendidik utama. Fungsi rumah surga dunia adalah sebagai tempat membangun keutuhan keluarga, ketenteraman, kebersamaan, bermain dan tempat rekreasi, guna membangun kesakinahan, kemawaddahan (cinta kasih) dan kerahmahan (kasih sayang).

Kala pandemi Covid-19, *baitii jannati* semakin relevan dan strategis sebagai wahana dan pendukung anak-anak belajar secara *online*, bapak/ibu bekerja secara *online*, produksi barang dan jasa, sekaligus pemasaran secara *online*, dan sebagainya. Kini, tak perlu lagi melepas ketegangan atau mencari hiburan di luar rumah. Segalanya dicukupkan dari rumah surga dunia.

Dalam konteks bernegara, masing-masing rumah surga dunia, mestinya menjadi miniatur Indonesia. Luas atau sempitnya rumah secara fisik, akan teratasi dengan luasnya jiwa bangsa. Rumah surga dunia senanatiasa cerah karena cahaya ilmu dan perilaku religius yang diajarkan dan dikembangkan sejak awal dan dikawal sepanjang hayat. Itulah rumah tanah Covid-19. *Wallahu'alam*. ***

Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo, S.H., M.Si.
Guru besar Ilmu Hukum UGM.

Pendidikan Kekerasan pada Anak

Oleh: Joko Yuliyanto

SALAH satu dari banyak tujuan manusia adalah untuk menikah. Meneruskan keturunan dan melanjutkan ideologi pemikiran mengenai pandangan hidup. Untuk mewujudkannya dengan diikat perjanjian suci (sakral) bernama pernikahan. Berikrar sumpah setia untuk menjadi pasangan sehidup semati dan berdoa agar tercipta kebahagian dan kedamaian dalam berumah tangga.

Pelaksanaan perkawinan diatur oleh sebuah lembaga agar hubungan antara suami istri secara yuridis maupun religius sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar nilai dan norma hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kemudian persepsi pernikahan berkembang sebagai sebuah kontrak sosial mengatur hak dan kewajiban (suami-istri) tanpa ada intervensi dari luar.

Sebelum ramai istilah emansipasi, seorang istri dalam tradisi Jawa kerap dijadikan korban kekerasan fisik dan emosional. Menganggap perempuan mempunyai strata lebih rendah daripada laki-laki. Kemudian muncul istilah *swarga nunut neraka katut* dan *kanca wingking* sebagai legitimasi ketidakberdayaan istri dalam peran keluarga. Seorang istri hanya berhak mengurusi bagian dapur, mengurus anak, dan melayani suami.

Namun ketika terbukanya informasi dan perkembangan peradaban, perempuan mulai aktif mengambil peran yang biasanya dikerjakan oleh laki-laki. Perempuan tidak mau lagi diikat dalam narasi ketertinggalan. Mulai menempuh pendidikan setinggi mungkin agar bisa mempunyai peran dalam status dan ekonomi rumah tangga. Di sisi lain, memudarnya kontrol suami terhadap istri menyebabkan banyak konflik internal dalam rumah tangga yang berujung Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian.

Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) sepanjang tahun 2020 mencapai 299.911 kasus dengan data pengaduan ke Komnas Perempuan mengalami peningkatan sebesar 60% dari semula 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Kasus yang paling menonjol adalah KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus), sedangkan Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama dengan 3.221 kasus (50%).

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang (terutama perempuan), yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ada sikap superioritas suami terhadap istri yang mengakibatkan terjadinya KDRT. Perempuan yang melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap suami lebih berisiko untuk menerima kekerasan fisik dan seksual. Ada juga faktor perselingkuhan, ekonomi atau pekerjaan, penggunaan zat adiktif, hingga status sosial atau tingkat pendidikan pasangan.

Dampak terhadap Anak

Kontradiksi antara ikrar pernikahan dan realita kehidupan rumah tangga patut menjadi perhatian dari berbagai pihak. KDRT bukan hanya menyebabkan perceraian, melainkan juga ada delik hukum yang termaktub dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Misalnya terjadinya kekerasan seksual yang terancam pidana 12 tahun penjara dan denda 36 juta rupiah.

Undang-undang tersebut diharapkan mampu menekan angka KDRT yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ada perlindungan khusus bagi korban kekerasan rumah tangga, baik secara emosional, seksual, dan fisik. Harapannya, dengan berkurangnya kasus KDRT, selaras dengan penurungan angka perceraian yang pada tahun 2020 meningkat sekitar 4,7 juta pasangan dari tahun sebelumnya.

Dampak paling memprihatinkan akan terjadi pada anak. Keluarga adalah pendidikan paling fundamental bagi anak-anak. Sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya akan membentuk karakter pada masa mendatang. Jika orang tua "mengajarkan" kekerasan pada anak, secara tidak langsung akan terjebak pada lingkaran kenakalan remaja.

Situasi semacam ini dapat mendorong timbulnya *crime imitation model* (peniruan model kejahatan) termasuk *delinquency imitation model* (peniruan model kenakalan remaja). Ingatan seorang anak akan merekam aktivitas pendidikan dini dalam lingkup keluarga, termasuk kekerasan verbal maupun nonverbal suami terhadap istri.

Ada kasus lainnya yang menempatkan anak pada posisi korban kekerasan berumah tangga. Bukan lagi menjadi saksi (melihat adegan KDRT), namun ada metode pendidikan kekerasan pada anak agar menjadi patuh kepada orang tua. Menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial, yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya.

Dalam berumah tangga, bukan hanya istri (perempuan) yang mendapat perlindungan hukum, seorang anak pun juga demikian. Seorang anak juga rentan terhadap kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga sosial (penelantaran). Sehingga tidak sehatnya hubungan rumah tangga akan berdampak signifikan terhadap perkembangan anak. Namun kebanyakan terjadinya kekerasan terhadap anak sering dijadikan dalih kedisiplinan.

Ada banyak lembaga pengaduan KDRT, demikian halnya dengan aturan hukum dan sanksi sosial bagi pelaku kekerasan rumah tangga. Namun sistem tersebut tidak sesuai dengan implementasi di lapangan. Masih banyak kasus KDRT terhadap istri dan anak yang tidak terpantau oleh lembaga atau institusi terkait.

Akhirnya KDRT dianggap kewajaran dalam sistem sosial budaya masyarakat sebagai bagian dari risiko berumah tangga. Rumah tangga adalah urusan internal yang tidak berhak dicampuri oleh intervensi pemerintah atau lembaga sosial. Harus ada tindakan pecegahan dini mulai dari bimbingan pranikah hingga sosialisasi pengaduan kekerasan dalam rumah tangga, agar lebih dikenal masyarakat.

Realita di lapangan masih banyak korban yang bungkam dari kasus KDRT karena dianggap aib keluarga dan sikap skeptis terhadap pelaku kekerasan. Dibutuhkan banyak peran hukum dan agama dalam membentuk sikap seseorang dalam berumah tangga. Agar tujuan kesakralan pernikahan yang mengedepankan kasih sayang tidak berbalik menjadi arena peperangan. *

Joko Yuliyanto
Penggagas komunitas seniman NU. Penulis buku dan naskah drama. Aktif menulis opini di media daring dan luring.

KORAN BERNAS www.koranbernas.id JUJUR - KONSTRUKTIF - BERETIKA

Komisaris Utama: Drs. Yos Suharto, M.Si. **Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Putut Wiryawan. **Wakil Pemimpin Umum/Wakil Pemimpin Redaksi:** Heru Catur Nugroho. **Redaktur Pelaksana:** Yvesta Putu Ayu Palupi **Sidang Redaksi:** Putut Wiryawan, Heru Catur Nugroho, Yvesta Putu Ayu Palupi, Warjono, Sholihul Hadi, Rosihan Anwar, Arie Giyarto, Sukendar, Daniel Tatag, Muhammad Zukhronnee Muslim, Leo Setiawan Prasojo, Rahadian Prasetyo, Nila Hastuti **(Sleman)**, Sariyati Wijaya **(Bantul)**, Sutaryono **(Gunungkidul)**, Sri Widodo **(Kulonprogo)**, Masal Gurusinga **(Klaten)**, V. Kirjito **(Muntilan)**, Bekti Maharani **(Semarang)**, Nanang W Hartono **(Kebumen)**, Endri Yarsana **(Temanggung)**, Wahyu Asmani **(Purworejo)**, Prasetiyo **(Purbalingga)**. **Disainer:** Muhammad Zukhronnee Muslim, Lilik Sumantoro. **Divisi Iklan:** Christina Hesti Apri Wulandani (Kepala).

Alamat Redaksi: Jl. Nitiprayan II, Gg. Antasena No.102A, Jomegatan, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182. Telepon (0274) 4293731
Alamat Tata Usaha: Jl. Gampingan Baru No. 31, RT-042/RW-009, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta. Telp. +6274-583831.
Koran Bernas *online* dan cetak diterbitkan oleh PT Rajawali Siaga, Jl. Gampingan Baru No. 31, RT-042/RW-009, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta. Telp. +6274-583831. NPWP: 31.692.786.2-541.000
Alamat web: https://koranbernas.id **Tarif Iklan Cetak:** Display warna Rp 18.000,-/mmk; hitam putih Rp 9.000,-/mmk. Kolom: Rp 6.000,-/mmk (minimal 1 kolom x 30 mm, maksimal 1 x 100 mm). Iklan baris Rp 6.000,-/baris. Iklan keluarga/duka cita: Rp 5.000,-/mmk. Advertorial warna Rp 14.000,-/mmk, hitam putih Rp. 7.000,-/mmk (minimal ¼ halaman). Semua harga ditambah PPN 10 %.
Tarif Iklan Online:
Posisi atas: Rp. 220.000,-/3 hari, Rp. 385.000,-/7 hari, Rp. 660.000,-/14 hari, Rp. 1.100.000,-/30 hari.
Posisi di bawah berita:
Rp. 198.000,-/3 hari, Rp. 352.000,-/7 hari, Rp. 572.000,-/14 hari, Rp. 990.000,-/30 hari.
Posisi samping kanan:
Rp. 165.000,-/3 hari, Rp. 275.000,-/7 hari, Rp. 495.000,-/14 hari, Rp. 825.000,-/30 hari.
Posisi bawah: Rp. 110.000,-/3 hari, Rp. 192.500,-/7 hari, Rp. 330.000,-/14 hari, Rp. 550.000,-/30 hari. Semua harga sudah termasuk PPN 10 %.
Harga iklan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Bank: Bank Mandiri A/C: 900-003-7272-367
Penerbit: PT Rajawali Siaga

Tetap Ingin Mengabdi di Gunungkidul

Guru SMPN 4 Patuk Gunungkidul Wasit Olimpiade Tokyo

KORANBERNAS.ID, GUNUNGKIDUL -- Tidak seperti biasanya, peringatan HUT ke-76 RI di Kabupaten Gunungkidul ada yang berbeda. Pada kursi tamu undangan tampak Wahyana, guru SMPN 4 Patuk Gunungkidul yang baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai wasit Bulutangkis Olimpiade Tokyo 2021.

Mengenakan topi dan setelan jas biru seperti yang dia kenakan saat Olimpiade, Wahyana duduk pada barisan depan tamu undangan. Selesai upacara, Bupati Gunungkidul Sunaryanta memberikan penghargaan kepada Wahyana. Sejumlah pejabat menyempatkan diri berfoto dengan pria ramah tersebut.

"Ini merupakan penghargaan pertama kali yang saya dapat dari pemerintah daerah Gunungkidul. Ini kebanggaan yang membuat saya terharu. Tadi rasanya saya ingin nangis sebetulnya," ucap Wahyana seusai menerima penghargaan di Alun-alun Wonosari, Selasa (17/8/2021).

SUTARYONO/KORANBERNAS.ID

Wahyana, guru SMPN 4 Patuk Gunungkidul, wasit Bulutangkis Olimpiade Tokyo 2021, menerima penghargaan Bupati Gunungkidul, Sunaryanta.

Diakui, sebagai wasit yang mampu berkiprah di kancah internasional, sebenarnya dia mudah pindah ke sekolah yang lebih dekat rumahnya. Selama sekitar 26 tahun dirinya anglaju dari Godean Sleman ke SMPN 4 Patuk Gunungkidul yang berjarak sekitar 70-an kilometer.

Namun semua dijalani dengan ikhlas, bahkan hingga kini tidak punya niat pindah dan akan tetap setia mengajar di pelosok pedesaan, sampai pensiun nanti.

Bahkan dalam waktu dekat sebelum kembali menjadi wasit beberapa kejuaraan dunia, Wahyana akan kembali mengajar seperti biasanya.

"Saya *nglaju* sudah sekitar 26 tahun dari Godean ke Gunungkidul dan saya sudah merasa nyaman di Gunungkidul, saya akan menikmati pekerjaan ini sampai pensiun di Gunungkidul," ucapnya.

Tentang prestasinya yang mampu menembus kancah Internasional, Wahyana mengaku ada tiga hal yakni beribadah, berdoa dan berusaha. Untuk berusaha, dilandasi niat, semangat pantang menyerah, disiplin dan fokus. "Saat sudah berhasil harus tetap rendah hati," tambahnya.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengucapkan terima kasih kepada Wahyana karena membawa nama baik Gunungkidul khususnya atau Indonesia pada umumnya di kancah Internasional.

Tak banyak orang dari Asia Tenggara yang mampu menembus sebagai wasit Olimpiade. "Peran serta beliau yang membanggakan, bagi bukan hanya Gunungkidul atau DIY tetapi Indonesia. Karena levelnya dunia," kata Sunaryanta. **(ryo)**

Oksigen Gratis di Rumah Dinas Bupati

KORANBERNAS.ID, BANTUL --Beberapa waktu lalu masyarakat sempat kesulitan memperoleh oksigen medis. Kalaupun bisa mengisi harus antre. Itu pun mahal.

Menyikapi kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Bantul membuat generator oksigen di Rumah Sakit (RS) Panembahan Senopati. Selain untuk suplai kepentingan oksigen pasien RS, juga dibagikan gratis bagi warga Bantul.

Launching gratis oksigen dilakukan Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih di Rumah Dinas Trirenggo, Kamis (12/8/2021). Lima perwakilan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) kalurahan hadir sebagai penerima pertama.

Hadir pula Sekda H Helmi Jamharis MM, Asek Pemerintahan Setda Bantul Hermawan Setiaji SIP, Direktur RS Panembahan Senopati I Wayan Marthana, Kepala Dinas Kominfo Fenty Yusdawati ST dan pejabat terkait.

Plt Kabag Kesra Edi Bowo Nurcahyo mengatakan dalam rangka keperpihakan kepada masyarakat Bantul, Bagian Kesra bersama instansi terkait mendistribusikan bantuan oksigen secara gratis.

Dana pengadaan oksigen berasal dari APBD Bantul serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. "Untuk kelancaran distribusi maka pengajuan pengisian ini harus melalui Satgas Covid kabupaten atau kalurahan ataupun dusun. Jadi tidak boleh orang per orang," katanya.

Setiap hari kuota 15 tabung bagi warga dengan masing-masing kapasitas 1 M3.

Bupati mengatakan *launching* gratis oksigen itu diperuntukkan warga yang isolasi mandiri ataupun mereka yang dirawat di *shelter*.

"Langkah pembuatan oksigen sendiri ini diambil mengingat masyarakat banyak yang membutuhkan namun kesulitan. Ketika ada, harganya naik sehingga merasa keberatan," katanya.

SARIYATI WIJAYA/KORANBERNAS.ID

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengisi tabung gas saat launching gas gratis bagi warga di rumah dinas bupati.

Keberadaan generator oksigen di RSUD Panembahan Senopati sebagai jaminan di Bantul tidak ada lagi kelangkaan oksigen. Selain untuk kebutuhan RS, hasil produksi diperbantukan bagi masyarakat penderita Covid.

"Rumah sakit harus steril dari pelayanan non-medis dan steril dari kerumunan maka pelayanan pengisian gas bagi warga dilayani di Rumah Dinas Bupati dan buka 24 jam," tambahnya.

Generator, lanjut bupati, menghasilkan 300 M3 atau 3.000 liter per hari. Untuk 15 M3 atau 15 tabung layanan digratiskan bagi warga dan dibuka selama pemerintah menetapkan pandemi Covid.

"Dengan harapan keberadaan oksigen gratis ini mampu menurunkan paparan Covid, menurunkan kematian dan meningkatkan kesembuhan," katanya.

Bupati meminta kerja sama dengan para lurah agar mengalokasikan pengadaan tabung oksigen yang bisa dipinjam masyarakat. Satgas perlu oxymeter agar mendeteksi kadar oksigen bagi warga yang isolasi. **(sra)**

Berjibaku Menyelam di Sungai Bawah Tanah 104 Meter

ISTIMEWA

Tim Penyelam TNI AL dari Koarmada II melakukan penyelaman di sungai bawah tanah Bribin Gunungkidul yang memiliki kedalaman 104 meter.

KORANBERNAS.ID, GUNUNGKIDUL -- Tim Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) Komando Armada II (Koarmada II) selama dua hari berjibaku di kedalaman 104 meter untuk melakukan revitalisasi bendungan sungai bawah tanah Bribin II di Dusun Sindon Kalurahan Dadapayu Semanu Gunungkidul.

Tim terdiri ketua Kapten Laut (T) Sugiarto, didampingi Lettu Laut (K) Musman Saad dan Letda Laut (S) Qusyairi beserta anggota tim, saling bahu-membahu di antara lokasi yang minim penerangan dan dinginnya air bawah tanah. Mereka harus berhati-hati karena banyaknya pipa dan instalasi di dalam air tersebut.

Kerja keras prajurit terbaik yang dimiliki oleh TNI AL itu pun membuahkan hasil. Pipa transfer yang tertutup akibat bencana badai dan gempa tahun 2018 bisa diperbaiki dan dibersihkan. Aliran air dari Sungai Bribin kembali lancar untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Gunungkidul.

Sebelumnya, beberapa kali ada penyelam yang datang ke lokasi untuk melakukan upaya perbaikan. Begitu mengetahui medan yang sulit, mereka memilih tidak melanjutkan pekerjaan.

"Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti permintaan dukungan penyelaman khusus dari Kementerian PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Serayu (BBWSS) dalam upaya revitalisasi dan rehabilitasi bendungan sungai bawah tanah Bribin II yang berada 104 meter di bawah tanah dalam kondisi rusak sejak dilanda badai dan gempa di tahun 2018. Tidak beroperasi selama tiga tahun," kata Kapten Laut (T) Sugiarto, Senin (9/8/2021).

Tim pun bergerak dan melakukan upaya penyelaman pada Jumat (6/8/2021) dan Sabtu (7/8/2021).

Saat meninjau bendungan, tim melihat kondisi air di bendungan meluap hingga masuk ruangan pompa turbin. Ruangan pompa dengan lebar 12 meter dan tinggi 8 meter hampir seluruhnya terendam air. Luapan terjadi dikarenakan pipa transfer air dari bendungan ke hilir dalam kondisi tertutup saat terjadi bencana dan mengakibatkan debit air di bendungan naik dan meluap menggenangi ruangan.

"Untuk membuka pipa transfer, harus dilakukan penyelaman. Katup pipa transfer berada di ruangan yang sudah terendam air tersebut," tutur perwira pertama tersebut.

Dantim menjelaskan, akses saat meninjau lokasi bendungan sungai bawah tanah Bribin berada 104 meter di bawah tanah, dengan kondisi minim penerangan serta akses udara, menjadikan medan ini sangat ekstrem sehingga dibutuhkan kondisi mental dan fisik yang kuat.

Selama dua hari tim bekerja saling bahu-membahu membuka akses saluran pipa transfer yang tergenang tersebut. "*Alhamdulillah* air yang sejak tahun 2018 tertahan di bendungan sudah dapat mengalir sampai ke hilir melalui pipa transfer," ungkapnya.

Menurut operator PDAM setempat, sebelumnya sudah ada beberapa penyelam lain yang datang ke lokasi bendungan untuk meninjau lokasi pekerjaan. Tidak satu pun yang mau meneruskan pekerjaan.

"Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tim Penyelam TNI AL yang telah membantu. Sekarang air bendungan sudah bisa mengalir dan genangan di ruangan *platform* pompa turbin sudah bisa diatasi, sehingga proses revitalisasi dan rehabilitasi bendungan sudah bisa dimulai," ungkapnya.

Bendung Bribin memiliki kemampuan kapasitas volume 400.000 meter kubik dan digunakan oleh masyarakat Gunungkidul untuk mengatasi kesulitan air baku saat kemarau tiba. Bendungan ini menyediakan pasokan air baku sepanjang tahun, menjadi tandon air selama musim kering untuk keperluan air baku (rumah tangga, pertanian, peternakan, pariwisata) dan kepentingan lainnya.

Kabupaten Gunung Kidul adalah daerah karst, dicirikan dengan minimnya sungai permukaan dan berkembangnya jalur jalur sungai bawah permukaan (SBT). Setiap tahun dalam musim kemarau, di daerah karst Pegunungan Seribu selalu mengalami kekeringan. Hal ini disebabkan karena langkanya air permukaan, dan diketahui adanya pola aliran sungai bawah tanah dengan potensi debit yang cukup besar (Seropan, Bribin, Baron, Ngobaran).

Dalam kurun waktu 1992 hingga 1996 dibangun sistem penyediaan air baku Bribin I dengan menggunakan sistem pemompaan dan pipanisasi untuk menyuplai air baku bagi 75.000 jiwa di wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul.

Dengan sistem pemompaan, biaya operasional dan pemeliharaan setiap tahun selalu mengalami kenaikan sehingga biaya produksi air per meter kubik menjadi sangat mahal.

Dikutip dari akun Twitter Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) @KemenPU, bendungan bawah tanah Bribin menjadi solusi untuk mengatasi kekeringan di Gunungkidul.

Bendungan bawah tanah Bribin bekerja dengan cara membendung air di dalam goa bawah tanah yang dialirkan ke permukaan untuk ditampung ke dalam reservoir. Air dari bendungan tersebut kemudian disalurkan ke desa-desa sekitar bendungan untuk memenuhi kebutuhan warga desa.

Adanya bendungan bawah tanah Bribin menjadi salah satu solusi untuk mengatasi bencana kekeringan yang kerap terjadi di Gunungkidul. Walau sempat mengalami kerusakan, bendungan bawah tanah Bribin mendapatkan bantuan dari berbagai pihak agar dapat berfungsi kembali, termasuk dari penyelam TNI AL.

"Semoga bermanfaat untuk masyarakat di daerah setempat. Semoga menjadi ladang amal ibadah kita," kata Sugiarto. **(sra)**

Patungan Beli Mobil Dimodifikasi Jadi Ambulans

ISTIMEWA

Mobil hasil patungan warga Jambidan Banguntapan Bantul, dimodifikasi jadi ambulans.

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Menangani pandemi Covid-19 tidak bisa dilakukan sendiri atau hanya sebagian elemen masyarakat. Butuh gotong royong, kerja sama dan juga kekompakan dari semua pihak.

Hal inilah yang disadari oleh warga Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Bantul. Bukan hanya tenaga, waktu dan pikiran, namun para donatur setempat juga patungan membeli mobil, kemudian disulap menjadi ambulans dan digunakan untuk operasional Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).

"Jadi mobil kami beli secara patungan dari para donatur, juga mitra. Kami beli harga Rp 25 juta," kata Widarto, Ketua FPRB Jambidan, Kamis (5/8/2021).

Sejak pertama mobil tersebut datang, sekitar sebulan silam, langsung digunakan dan dimanfaatkan warga. Mobil ini tidak hanya diperuntukkan keperluan pasien Covid-19 namun non-Covid-19 juga.

Mobil keluarga warna biru itu selesai dimodifikasi. Pada bagian atas dipasang sirine menggunakan rotator motor. "Kebetulan warga Jambidan ada yang memiliki bengkel, rotator diset sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sirine. Ini juga tidak membayar. Kalau beli harganya juga lumayan," katanya.

Pada bagian belakang, kursi dicopot dan diberi *dragbar* (tandu). *Dragbar* juga tidak beli namun dibuat oleh warga yang kebetulan memiliki usaha perbaikan jok. Disediakan pula tabung oksigen serta obat-obatan bantuan dari mitra.

"Jadi semua memang hasil swadaya dan gotong royong. Harapannya, dengan mobil ini akan menjadi armada bagi masyarakat di Jambidan dan siapapun yang membutuhkan," katanya.

Apalagi memang tidak jarang untuk kebutuhan ambulans harus antri, mengingat banyak yang membutuhkan.

Mobil tersebut *standby* 24 jam, bagi yang akan menggunakan bisa langsung berkomunikasi dengan FPRB Jambidan di posko Balai Kalurahan ataupun di Padukuhan Kretek.

Terpisah, Panewu Banguntapan Drs Fauzan Mu'arifin, mengatakan semangat gotong royong menangani pandemi harus ditanamkan di masyarakat.

Dengan demikian, akan mempercepat semua bangkit dari dampak yang ditimbulkan. Maka apa yang dilakukan oleh warga di Jambidan patut diapresiasi dan bisa menjadi contoh. "Kita perlu gotong royong, peduli satu dan lainya, dan bersama-sama melewati pandemi," katanya.

(sra)

Sampai September, Vaksinasi Mencapai 80 Persen

KORANBERNAS.ID, SLEMAN— Vaksinasi Covid-19 di Sleman, terus dikebut. Hingga September nanti, Pemkab menargetkan prosentase vaksinasi sudah mencapai 80 persen.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa mengatakan, saat ini vaksinasi di Sleman terus dimaksimalkan untuk memperlambat dan mengurangi penyebaran Covid-19.

"Kita optimistis target akan tercapai. Kami berharap dukungan masyarakat agar vaksinasi ini sukses," kata Danang, saat melakukan peninjauan vaksinasi massal di Gereja Katolik Paroki ST Yoseph Medari, Murangan, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Senin (22/8/2021). Peninjauan dilakukan untuk memastikan berjalannya program vaksinasi sebagai upaya memperlambat atau mengurangi penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Sleman.

Danang bersama dengan panitia penyelenggara vaksinasi tersebut melakukan peninjauan langsung vaksinasi yang menyasar Jemaah Gereja dan masyarakat sekitar.

Ketua Panitia penyelenggara vaksinasi, Lorentinus Martono menyampaikan pihaknya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Sleman dalam penyelenggaraan vaksinasi tersebut. Selain itu, Lorentinus Martono menuturkan terdapat sebanyak 650 orang yang menerima vaksin dosis pertama ini.

"Kami bekerja sama dengan Dinkes Sleman menyediakan kuota sebanyak 650 vaksin sinovac. Sasaran vaksinasi ini yaitu menyasar masyarakat sebanyak 150 vaksin, sisanya menyasar jemaah Gereja Katolik Paroki ST Yoseph Medari, Satgas Covid-19 dan relawan," katanya.

Lorentinus Martono menuturkan vaksinasi kali ini merupakan dosis pertama dan untuk dosis kedua akan diselenggarakan di lokasi yang sama pada tanggal 21 September 2021 mendatang.

ISTIMEWA

Danang Maharsa meninjau vaksinasi massal di Gereja Katolik Paroki ST Yoseph Medari, Murangan, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Senin (22/8/2021).

Sebelumnya, Tim Pendamping Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pusat melakukan peninjauan lapangan penanganan Covid-19 secara langsung di Kabupaten Sleman. Peninjauan dilakukan di Pasar Sleman Unit I dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman, Kamis (19/8/2021).

Ichsan Syarifudin selaku ketua tim menjelaskan, peninjauan ini untuk melihat bagaimana masyarakat dan Pemerintah Daerah Sleman dalam menangani Covid–19. Dalam peninjauan ini tim Satgas Covid-19 Pusat menekankan masyarakat untuk tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) dengan selalu menerapkan 5M.

"Sleman menjadi salah satu wilayah dengan kasus Covid-19 yang tinggi, namun saya yakin jika selalu mematuhi prokes serta dukungan dari pemerintah daerah dalam percepatan vaksinasi, maka lambat laun akan menuju tren positif," ujarnya.

Tim juga melakukan peninjauan di RSUD Sleman, untuk melihat bagaimana penanganan, kesiapan bangsal isolasi, serta sarana prasarana yang disediakan rumah sakit dalam menangani kasus Covid-19. Selain itu tim juga meninjau secara langsung proses vaksinasi yang dilakukan di Gedung RSUD Sleman lantai 4.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menjelaskan bahwa saat ini Pemkab Sleman terus memaksimalkan *Testing, Tracing* dan *Treatment* (3T) dalam penanganan kasus positif Covid-19. Sosialisasi dalam upaya pencegahan juga terus digalakkan untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaan Covid-19.

"Pemkab Sleman juga memaksimalkan pemanfaatan Isoter, ini sesuai arahan Bapak Kapolri dan Panglima TNI dan pemerintah terus bersinergi bersama masyarakat, TNI/Polri dalam memutus rantai penyebaran Covid-19," kata Kustini. **(ila)**

Bupati Minta Tarif Tes PCR Turun

KORANBERNAS.ID, SLEMAN-- Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo meminta biaya layanan tes PCR yang ada di Sleman turun. Hal itu sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo yang menurunkan harga tes PCR menjadi Rp 450 ribu hingga Rp 550 ribu.

"Saya minta agar biaya tes PCR yang ada di Sleman semua bisa satu suara (harga). Karena ini adalah instruksi langsung dari Presiden untuk meringankan beban masyarakat," ungkap Kustini, Jumat (20/8/2021).

Kustini mengatakan penurunan harga PCR itu yang selama ini ditunggu masyarakat. Sebab, selama ini masyarakat cukup terbebani dengan mahalnya biaya tes PCR.

"Saya kira ini yang ditunggu oleh masyarakat karena PCR itu kan jadi syarat orang bepergian. Maka kalau terlalu mahal, masyarakat jadi sulit semuanya," kata Kustini.

Maka ketika Presiden menetapkan harga dan kemudian diminta untuk turun, menurut Kustini itu adalah berita baik. Dengan turunnya harga PCR Rp 450 ribu hingga Rp 550 ribu, tentu membuat masyarakat senang. Karena harga itu jauh lebih murah sampai dengan 50 persen.

"Saya kira ini berita baik, agar masyarakat mendapatkan layanan yang mudah serta murah," terang Kustini.

Untuk itu, Kustini meminta Dinas Kesehatan untuk pro aktif melakukan pengawasan harga tes PCR di fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sleman. Jika kedapatan masih belum menurunkan tarif, Dinas terkait bisa melakukan pemanggilan.

ISTIMEWA

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo.

Pemanggilan itu untuk meminta penjelasan faskes mengapa tarifnya masih tinggi. Sesuai kebijakan Kemenkes, Pemkab Sleman juga berupaya melakukan pengawasan.

"Untuk tarif PCR turun itu akan kami koordinasikan dengan laboratorium dan juga rumah sakit yang ada. Kami lihat tarifnya turun atau tidak, jika tidak sesuai Kemenkes, kami akan panggil," imbuh Kustini.

"Selain itu, testing sebenarnya tidak harus menggunakan PCR. Bisa juga menggunakan antigen. Dengan tes antigen kalau dia reaktif bisa diteruskan ke sana, kalau negatif itu sebenarnya cukup. Dan ini bisa juga dipakai sebagai alat untuk memperbanyak testing lagi," pungkas Kustini. **(ila)**

PKK Sleman Salurkan Bantuan Sembako

KORANBERNAS.ID,SLEMAN--Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan bakti sosial di Kantor Kalurahan Sidoluhur, Godean, Jumat (20/8/2021). Kegiatan bakti sosial tersebut berupa penyerahan sembako kepada masyarakat Sidoluhur yang diserahkan secara langsung oleh Ketua PKK Kabupaten Sleman, R.Ay Sri Hapsari Suprobo Dewi.

Ketua PKK Kalurahan Sidoluhur, Amma J Chamim menyampaikan, kegiatan bakti sosial pemberian sembako di wilayah Sidoluhur merupakan kegiatan yang rutin diselenggarakan satu kali dalam satu minggu yaitu pada hari Jumat.

"Kegiatan bakti sosial ini sudah dimulai Juli 2019 sampai saat ini. Terlebih saat adanya pandemi, kegiatan ini terus berlanjut dengan menambah kategori yang disasar," jelasnya.

Amma menuturkan bahwa sebelumnya kegiatan bakti sosial tersebut menyasar masyarakat yang dikategorikan menjadi empat kelompok yaitu anak yatim piatu, bayi dan ibu hamil, lansia dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Seiring dengan perkembangan kondisi saat ini, kegiatan bakti sosial tersebut kini juga menyasar untuk kategori masyarakat yang menjalani isolasi mandiri dikarenakan Covid-19.

ISTIMEWA

R.Ay Sri Hapsari Suprobo Dewi menyerahkan bantuan sembako di Kantor Kalurahan Sidoluhur, Godean, Jumat (20/8/2021).

"Kegiatan ini mendapatkan dana murni dari sejumlah donator yang selama ini ikut membantu. Saat ini jumlah sembako yang disiapkan berjumlah 72 paket sembako," jelasnya.

Sementara Sri Hapsari menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan sosial yang rutin diselengarakan PKK Kalurahan Sidoluhur.

"Kegiatan ini tentunya kami harapkan dapat berlanjut, ada maupun tidak ada pandemi, kegiatan seperti ini perlu dilanjutkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut juga Sri Hapsari menyalurkan secara langsung bantuan paket sembako kepada masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri di shelter Covid-19 Kalurahan Sidoluhur. Di Samping itu juga pihaknya memberikan bantuan sebanyak 30 paket beras yang juga akan disalurkan kepada masyarakat membutuhkan di wilayah Sidoluhur. **(ila)**

Tanam Bawang Merah Berbuah Uang

KORANBERNAS.ID, SLEMAN – Benih bawang merah yang bermutu selalu didambakan petani. Selain memiliki kelebihan serta berkualitas lebih baik, hasil panennya pun menggembirakan.

Inilah yang menggerakkan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (BPTP) DIY membudidayakan benih bawang merah varietas Lokananta (biji ke umbi).

Bekerja sama dengan Kelompok Tani "Tani Rukun" akhirnya berhasil dipanen benih bawang merah pada lahan seluas 3.000 m^2 di Karang Kalasan Tirtomartani Kalasan, Selasa (24/8/2021), yang dihadiri langsung Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa.

Koordinator Program dan Evaluasi BPTP DIY, Ahmad Yunan Arifin, menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya inisiasi perbenihan bawang merah asal biji di Kabupaten Sleman.

Selain itu, juga sebagai upaya mendukung penyediaan benih bawang merah bermutu sepanjang tahun.

Menurut Ahmad, pengembangan benih bawang merah asal biji memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya terbebas dari penyakit yang membawa benih (*seed born disease*), tidak adanya masa dormansi bibit yang biasa terjadi pada umbi di awal pertanaman dan lebih unggul baik produktivitas maupun fisiologis.

"Keunggulan lainnya yaitu kebutuhan benih per hektar lebih sedikit sehingga mengurangi kebutuhan biaya pembelian benih sumber, masa simpan lebih lama, distribusi dan penyimpanan lebih mudah dibandingkan benih umbi," tambahnya.

Janu Riyanto selaku Ketua Kelompok Tani "Tani Rukun" menjelaskan benih yang ditanam mencapai 75.000 benih. Dia berharap Lokananta menjadi benih sumber yang akan diturunkan dan ditanam lagi untuk menjadi benih Bawang Merah Sembada.

"Bawang merah saat ini menjadi salah satu tanaman hortikultura unggulan namun masih banyak benih yang didatangkan dari luar dan belum adaptif. Kami ingin Sleman menghasilkan benih bawang merah sendiri dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas serta cocok dengan kondisi Sleman," jelas Janu.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa memberikan apresiasi dan sangat bangga dengan petani di Karang Tirtomartani Kalasan yang berhasil melakukan panen raya benih bawang merah tersebut. Inovasi budidaya bawang merah dengan biji ini diharapkan mampu menekan biaya produksi yang dikeluarkan petani.

ISTIMEWA

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa secara simbolis menyerahkan benih bawang merah kepada perwakilan kelompok tani.

"Saya mengharapkan upaya yang dilakukan oleh para anggota Tani Rukun Karang Tirtomartani Kalasan bersama BPTP DIY ini dapat menjadi inspirasi dan ditiru oleh para petani bawang merah di Kabupaten Sleman," kata Danang.

Seiring perkembangan zaman petani era sekarang sudah waktunya mengubah paradigma pemikiran lama. Jika pada zaman dulu petani berpikir sederhana, menanam bawang merah berbuah bawang merah, maka saat ini paradigma itu harus diubah. Menanam bawang merah harus berbuah uang.

"Filosofi ini artinya petani harus berfikir produktif dalam bercocok tanam, selektif memilih jenis tanaman pertanian yang prospeknya cerah seperti bawang merah varietas Lokananta yang unggul agar dapat menghasilkan uang untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat," kata Danang. **(ila)**

ISTIMEWA

Komisi A DPRD Bantul melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke shelter kalurahan.

ISTIMEWA

Komisi D DPRD Bantul terjun dan menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Dorong Terbitnya Perda Penanganan Covid-19

Komisi A DPRD Bantul Ajak Semua Pihak Ikut Berperan

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Ketua Komisi A DPRD Bantul, Muhammad Agus Salim, mengatakan penanganan Covid-19 tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Perlu peran serta semua pihak agar pandemi ini segera berlalu.

Seluruh lapisan masyarakat harus disiplin dan taat menerapkan protokol kesehatan (prokes), meliputi memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas yang tidak penting.

"Kita harus bahu membahu menangani Covid-19, sesuai dengan peran kita masing-masing, dengan tetap menerapkan prokes pada dalam setiap kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan," kata Muhammad Agus Salim kepada *koranbernas* di kantornya, Senin (23/8/2021).

Komisi A, lanjut Agus Salim, juga melakukan berbagai upaya dan langkah terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantul. Pertama, walaupun baru melalui sosial media dewan mendorong Pemerintah Kabupaten Bantul segera membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait penanganan Covid-19.

"Aparat Penegak Hukum (APH) ketika melakukan penertiban atau tindakan kaitan pelanggaran prokes bisa mengacu sesuai Perda yang ada," katanya.

Kedua, terkait penanganan Covid-19, mereka telah mengkomunikasikan dengan eksekutif atau Pemkab Bantul agar memberi dukungan kepada Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). "Kami minta untuk diperhatikan terkait dukungan anggaran," tandasnya.

Misalnya, melalui anggaran yang ada di desa. "Nanti harus ada alokasi berapa persen untuk penanganan Covid termasuk dukungan bagi FPRB di wilayah masing-masing," katanya.

Ketiga, Komisi A melakukan beberapa kegiatan dengan terjun dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap penanganan Covid-19 di masyarakat, salah satunya ke shelter kalurahan yang ada di kabupaten ini.

"Kendati tidak semua bisa kita datangi, namun setidaknya kita bisa melihat seperti apa penanganan yang dilakukan di masyarakat kita," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Wakil Ketua Komisi A, Hj Suratun SH, mengatakan komisi ini melalui ketugasannya mendorong adanya produk hukum atau aturan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Selain itu, juga terjun langsung guna memastikan masyarakat mendapat bantuan dan penanganan yang tepat, seperti tempat isolasi di shelter dengan dukungan yang memadai.

"Marilah kita bergandengan tangan, bersama-sama untuk menangani Covid-19 sehingga pandemi ini segera berlalu," kata politisi perempuan dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Anggota DPRD, lanjut Suratun, juga terjun ke masyarakat secara langsung untuk memberikan bantuan sembako, membantu pemakaman dan hal lain yang dibutuhkan.

"Menangani Covid-19 tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah. Perlu peran serta dari semua lapisan masyarakat," katanya. **(sra)**

Jumakir Tak Kenal Waktu Membantu Masyarakat

KORANBERNAS.ID, BANTUL – Jajaran Komisi A DPRD Bantul serius dan bersungguh-sungguh menjalankan peran dan tugas pokok fungsinya terkait dengan penanganan Covid-19 di Bumi Projotamansari.

Selain mendorong terbentuknya produk hukum, komisi yang membidangi pemerintahan ini juga tiada kenal lelah dan jemu bahkan tidak mengenal waktu hadir *ngaruhke* masyarakat Bantul.

Tujuannya agara mereka yang terdampak secara ekonomi memperoleh akses bantuan sosial. Sedangkan mereka yang terdampak kesehatannya memperoleh kepastian shelter yang memadai berikut daya dukungnya, begitu pula mereka yang berduka karena pandemi.

Sekretaris Komisi A DPRD Bantul, Jumakir, merupakan salah seorang di antaranya. Pria ini sehari-harinya selama 24 jam menfokuskan tenaga dan pikiran didedikasikan bagi masyarakat yang diwakilinya. Anggota dewan dari Daerah Pemilihah (Dapil) Sedayu-Kasihan ini bahkan terjun langsung bersama FPRB dan relawan mengikuti proses pemakaman standar prokes.

"Ini adalah wujud dukungan saya sebagai anggota dewan terhadap masyarakat Bantul yang saat ini terhantam badai Covid-19," kata Jumakir.

Begitu ada masyarakat memberi kabar duka, politisi asal PPP itu pun meluncur ke lokasi. Dia tidak jarang baru bisa pulang ke rumahnya di Jalan Gunungsempu Kalurahan Tirtonirmolo Kasihan saat dini hari. Istri dan anak-anaknya memahami tugasnya sebagai wakil rakyat.

Jumakir selalu mengingatkan masyarakat yang disambanginya untuk tidak kendor menegakkan protokol kesehatan (prokes).

"Kita harus disiplin prokes dengan memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir serta menjaga jarak. Kurangi mobilitas yang tidak perlu dan menjauhi kerumunan. Saya berharap dengan kedisiplinan ini, angka positif Covid-19 di Bantul terus mengalami penurunan," kata Jumakir.

ISTIMEWA

Sekretaris Komisi A DPRD Bantul, Jumakir, mengikuti prosesi pemakaman standar prokes bersama FPRB dan relawan.

Jumakir melihat saat ini Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) membutuhkan tambahan tenaga pelayanan pasien. Dirinya berharap ada penggeseran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang melaksanakan *Work From Home* (WFH) atau bekerja dari rumah untuk membantu pelayanan di Puskesmas.

Mereka adalah ASN yang tidak terkait pelayanan medis namun membantu bagian administrasi. "Sarana kesehatan sangat membutuhkan tambahan dukungan SDM atau personel. Saya kira ASN yang sedang WFH bisa diperbantukan ke bagian administrasi. Saya rasa itu bisa," katanya. **(sra)**

Jangan Sampai Ada Yatim Piatu Tercecer dari Pendataan

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul saat ini sedang melaksanakan prosespendataanterhadapanak yatim piatu akibat Covid-19. Pemerintah daerah sedang menyiapkan tiga jaminan yakni jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan jaminan hidup.

"Saya menyambut baik pendataan ini, karena sangat besar manfaatnya bagi masyarakat, khususnya anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal saat pandemi Covid-19," kata Teguh Santoso SE, anggota Komisi A.

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan, jangan sampai ada anak yatim piatu yang tercecer dari pendataan. Artinya, perlu peran aktif masyarakat termasuk ditataran RT. Mereka yang mengetahui kondisi dilapangan. Jika sampai tercecer, akan menimbulkan permasalahan. Ada yang menerima bantuan dan ada yang tidak.

"Jangan sampai niat yang mulia dari pemerintah daerah ini menimbulkan masalah baru. Pendataan harus dilakukan secara hati-hati, teliti dan jangan sampai ada unsur *like and dislike*," katanya.

Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih mengatakan pendataan sedang diproses. "Sekarang *on going* proses, belum final. Jadi kalau masyarakat ada yang mengetahui tetangganya meninggal dunia dan ada anak, silakan lapor RT atau dukuh di wilayah masing-masing untuk dilakukan pendataan," kata bupati.

Mereka akan mendapat tiga jaminan. Khusus jaminan pendidikan minimal anak tersebut bisa mendapat pendidikan gratis hingga jenjang SMA. Bupati berharap jangan sampai di Bantul ada anak telantar karena kedua orang tuanya meninggal akibat Covid-19. **(sra)**

SARIYATI WIJAYA/KORANBERNAS.ID

Anggota Komisi A DPRD Bantul, Teguh Santoso SE memberi bantuan pendidikan kepada yang membutuhkan.

Kembali ke Alam Berburu Labu

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Berbagai upaya dilakukan masyarakat untuk menjaga imun agar tetap sehat, bugar, dan *fit* di tengah pandemi Covid-19. Selain olahraga, istirahat teratur, minum vitamin maupun berjemur, banyak pula yang berikhtiar sehat dengan asupan makanan sehat.

Salah satu yang dilakukan adalah *back to nature*, atau kembali ke alam dan mengkonsumsi hasil alam secara alamiah dengan mengurangi makanan yang berpengawet.

Hal itulah yang mengilhami Suryanto (41), pemilik "Surya Tani" untuk terus berinovasi menanam beragam sayuran di lahan miliknya seluas 1.000 meter persegi di Jalan Samas Palihan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro Bantul.

Dibantu istrinya, Siti Nurwidiyati, mereka berdua menanam jahe merah dan beragam tanaman umbi-umbian, pepaya, pisang, jagung manis dan aneka labu yakni labu kuning (*cucurbita moschata*), labu *kabocha* (*cucurbita maxima L*) dan labu madu (*butternut pumkin*) sebuah labu yang bentuknya mirip lonceng.

Saat *koranbernas.id* ke lokasi tampak beragam bibit tanaman sayur diproduksi dijual. Hijau dan segar suasananya.

"Saat ini orang banyak berburu olahan sayuran segar. Dan yang permintaannya tinggi saat pandemi adalah jenis labu-labuan," kata Suryanto saat berbincang di lahan miliknya, Selasa (10/8/2021).

Karena keterbatasan produksi, pihaknya belum mampu memenuhi permintaan tersebut. Bahkan hasil panennya sering habis dijual sendiri, di pasar lokal sekitar tempat tinggalnya atau pun *dikulak* antar-pedagang.

"Kami sebenarnya ada permintaan dari swalayan untuk memasok jenis labu-labuan. Tapi terus terang kami kewalahan karena stok produksi yang sedikit," katanya.

Jenis labu-labuan diburu karena bisa dimasak dan diolah sebagai pengganti beras. Ini tentu aman bagi mereka yang menderita diabetes (penyakit gula). Adapun labu bisa dikreasi menjadi beragam olahan, mulai disayur, dibuat aneka kue serta puding. Daunnya pun bisa dibuat *buntil* dan jenis masakan lain.

"Saat pandemi, orang tentu ingin lebih sehat. Maka olahan sayuran segar adalah sebuah pilihan yang tepat," kata Suryanto.

Saat ini dirinya menggerakkan warga sekitar untuk menanam sayur, termasuk labu, karena permintaan yang tinggi dari konsumen. Mereka bisa memanfaatkan lahan pekarangan.

"Saat pandemi dan PPKM seperti sekarang, orang banyak di rumah, maka bisa memanfatkan waktu dengan berkebun. Selain bisa untuk konsumsi sendiri, kalau butuh tinggal petik, secara ekonomi juga menguntungkan," katanya.

Buah dan sayur juga memiliki nilai jual. Seperti labu madu dibanderol Rp 20.000 per kilonya, labu *kabocha* Rp 20.000 per kilogram dan labu sayur (labu kuning) dijual Rp 10.000 per kilogram.

Seorang warga Ngabean Kota Yogyakarta, Saptoto (46), yang datang ke "Surya Tani" mengaku pada masa pandemi menjaga kesehatan, termasuk menjaga makanan sangatlah diutamakan.

"Apalagi saya punya diabetes, jadi soal makan sangat saya jaga. Saya hidari pemanis atau gula. Saya banyak konsumsi buah dan sayuran. *Ya* seperti labu ini. Bisa saya olah sebagai pengganti nasi," katanya. **(sra)**

SARIYATI WIJAYA/KORANBERNAS.ID

Suryanto pemilik "Surya Tani" Jalan Samas Bambanglipuro Bantul menunjukkan hasil panen labu.

Program Padat Karya Bergulir Kembali

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Gatot Subroto No 1 Bantul Telepon 0274-367277, e-Mail: disnakertrans@bantulkab.go.id

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menggulirkan kembali program padat karya pada triwulan ketiga tahun 2021.

Padat karya yang bersumber dari anggaran APBD Bantul tahun 2021 dialokasikan ke 103 titik. Setiap titik dianggarkan Rp 100 juta. Pengerjaan dilakukan selama 21 hari.

"Pelaksanaan proyek harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) karena saat ini dalam situasi pandemi Covid-19," kata Istirul Widilatuti MAP, Sekretaris Disnakertrans Bantul, kepada *koranbernas* di kantornya, Senin (23/8/2021).

Kegiatan padat karya diharapkan mampu memberikan solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Misalnya, ada yang bekerja kemudian

ISTIMEWA
Istirul Widilastuti MAP.

dirumahkan bahkan mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat dampak pandemi. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan karena ketiadaan pendapatan.

"Banyak saudara kita mengalami hal tersebut, dan saya berharap padat karya menjadi salah satu cara membantu masyarakat. Walaupun ini sifatnya jangka pendek," katanya.

Istirul berharap perekonomian masyarakat ikut terdongkrak, khususnya di wilayah yang mendapat program padat karya. "Misalnya warung-warung juga ikut laris," katanya.

Pekerja atau anggota kelompok mendapat upah yang disebut Hari Orang Kerja (HOK). Satu kelompok terdiri 26 orang mulai ketua kelompok, tukang hingga pekerja. Ketua kelompok mendapat Rp 90.000 per hari, tukang Rp 80.000 dan anggota kelompok Rp 70.000 per hari.

"Semoga ini memberi manfaat besar bagi yang menerima program. Padat karya juga menambah infrastruktur di pedesaan," katanya. Program ini berupa pembangunan corblok jalan, pembuatan talud serta saluran irigasi tersier.

Secara terpisah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Bantul, Aris Suharyanta MM, mengatakan digulirkannya kembali program padat karya memiliki tujuan diantaranya untuk penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Terlebih dalam situasi pandemi, banyak saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Saya berharap program ini menjadi salah satu penolong," katanya seraya berharap masyarakat akan mendapat keuntungan berupa pembangunan infrastruktur di wilayahnya. **(sra)**

SARIYATI WIJAYA/KORANBERNAS.ID
Salah satu lokasi padat karya yang bersumber dari APBD Bantul 2021 di RT 01 Sribitan Kalurahan Bangunjiwo Kasihan Bantul.

Padat Karya Disambut Gembira

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Digulirkannya kembali proyek padat karya memperoleh sambutan gembira masyarakat. Sejak awal mereka memang menanti program tersebut. Selain merasakan manfaat dengan bertambahnya pendapatan ekonomi dan kesejahteraan, mereka juga sangat terbantu dengan adanya pembangunan infrastruktur.

Dusun Sribitan RT 01 Kalurahan Bangunjiwo Kasihan Bantul merupakan salah satu wilayah menerima program pembuatan corblok jalan dengan panjang 175,14 meter dan lebar 3,5 meter.

Dari pantauan *koranbernas*, Senin (23/8/2021) di lokasi, jalan yang dibangun merupakan penghubung antara RT 01 dengan RT 02 yang kondisi jalannya masih berupa tanah.

"Kalau hujan tanahnya berlumpur. Jadi adanya program padat karya sangat kami syukuri. Setelah diberitahu ada proyek, kami segera membuat kelompok warga di sini," kata Nanang Wisynuaji selaku ketua saat ditemui di rumahnya tidak jauh dari lokasi corblok jalan.

Keberadaan jalan tersebut sangat membantu mobilitas warga. "Di sini juga sekarang mulai banyak dibangun perumahan. Jadi keberadaan jalan yang dicorblok sangat membantu mobilitas kami," katanya.

Dukuh Sribitan, Supardal, mengatakan pembangunan corblok bermanfaat bagi warga setempat. "Terima kasih atas program yang digulirkan," ucapnya.

Terpisah, Lurah Seloharjo Kapanewon Pundong Bantul, Marhadi Badrun, menyambut baik adanya padat karya. Program ini sangat membantu akses maupun kesulitan yang dialami warga.

Setiap tahun kalurahan selalu mendapat program padat karya. Ada yang berupa talud, saluran irigasi tersier dan program corblok jalan. "Terima kasih, program padat karya sangat bermanfaat. Kami menyambut gembira," kata Badrun.

Selain mendapat manfaat insfrastruktur, warga juga mendapat tambahan pendapatan dari program yang berjalan.

Panewu Banguntapan Bantul Drs Fauzan Mua'rifin menyatakan pogram padat kaya sangat dinantikan warga. "Program ini benar-benar bermanfaat. Apalagi situasi seperti sekarang, di mana masyarakat kita butuh dukungan dari berbagai aspek," katanya. **(sra)**

Padat Karya Tidak Boleh Dikerjakan Malam Hari

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Program padat karya yang digelar setiap tahunnya memiliki beberapa aturan. Untuk itulah jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) Bantul memberikan pembekalan kepada para Pengawas Lapangan (PL).

Pada situasi pandemi Covid-19, pembekalan dilakukan secara virtual dengan zoom meeting. Jumlah PL setiap titik satu orang. Total di Bantul terdapat 163 PL.

Adapun rinciannya, 60 orang mengawasi 60 lokasi padat karya bersumber dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemda DIY dengan masing-masing titik nilainya Rp 160 juta. Pengerjaan dilakukan sejak 4 Agustus dan dikerjakan selama 18 hari.

Sedangkan 103 PL mengawasi 103 titik padat karya yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bantul dengan nilai anggaran setiap titiknya Rp 100 juta. Pengerjaan dilakukan selama 21 hari.

"Tugas PL adalah memastikan proyek padat karya berjalan sesuai dengan aturan," kata Rumiyati MHum, Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul.

Dia menegaskan, pengerjaan harus sesuai dengan gambar yang ada serta tidak boleh dikerjakan lembur atau malam hari. "Padat karya tidak boleh digarap malam-malam. Ini sudah menjadi aturan. Hari Minggu dan libur nasional pengerjaan juga diliburkan," kata Rumi.

Mengingat saat ini masih situasi pandemi, pekerja harus mentaati protokol kesehatan yakni mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak aman serta memakai masker. Pekerja padat karya mendapat jatah masker dari Disnakertrans Bantul.

"Saya berharap pengerjaan sesusai dengan gambar dan sesuai dengan tenggat waktu yang ada," katanya. **(sra)**

SARIYATI WIJAYA/KORANBERNAS.ID
Pengawas Lapangan (PL) program padat karya mendapat pembekalan secara virtual dari Disnakertrans Bantul.

Prambanan Jazz Festival 2021 Menolak Menyerah

KORANBERNAS ID, YOGYAKARTA -- Pagebluk Covid-19 yang menghantam dunia sejak akhir 2019 silam benar-benar mengubah perilaku umat manusia. Tak terkecuali dunia hiburan. Prambanan Jazz Festival (PJF) salah satunya. Perhelatan musik tahunan berskala internasional yang dilaksanakan di pelataran Candi Prambanan Yogyakarta ini terus berupaya tidak pernah absen hadir saban tahun bagi pecinta musik tanah air.

Pada 2020, Prambanan Jazz Festival hadir dengan konsep virtual yang secara langsung disiarkan dari *venue* Mahakarya Candi Prambanan. Hujan yang mengguyur tempat penyelenggaraan kala itu tidak membuat perhelatan ini berhenti. Segala siasat tidak terduga dilakukan PT Rajawali Indonesia selaku penyelenggara agar penonton yang menikmati konser dari rumah tidak kehilangan kemegahan sebuah perhelatan musik berkelas.

Awal tahun ini menjadi sebuah titik terang bagi pegiat festival apapun di tanah air. Semua optimis bisa menyelenggarakan festival dengan protokol kesehatan yang baik. Setahun pandemi dirasa sudah cukup untuk belajar menyiasati agar virus Corona tidak menyebar di sebuah konser.

Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, bahkan beberapa kali hadir secara *offline* di sebuah perhelatan musik. Grand Final Indonesian Idol yang diselenggarakan April 2021, salah satunya. Sandiaga kala itu mengakui jika penyelenggaraan Indonesian Idol ini sudah memenuhi standar protokol kesehatan yang ketat.

"Protokol kesehatan ini bukan saja memberikan rasa aman pada kru tapi juga *performer* dan penonton," sebutnya waktu itu.

Secercah harapan ini direspons pegiat festival. Semua merasa siap dengan konsep penyelenggaraan yang baik dan aman bagi kesehatan semuanya. Prambanan Jazz Festival (PJF) 2021 pun demikian.

DOK.KORANBERNAS.ID

Orkes Sinten Remen featuring Endah Laras dalam Perhelatan Prambanan Jazz Virtual Festival pada 2020 silam.

Tanggal 2-4 Juli dipilih menjadi saat perhelatan di 2021 ini. Tanggal itu seperti mengembalikan ritual tahunan PJF sebelumnya.

Namun apalah daya. Pada Juli 2021 juga, kasus terkonfirmasi Covid-19 harian di Indonesia melonjak tajam. Varian Delta yang disebut berasal dari India membuat virus ini lebih sulit dikendalikan.

Bagaimanapun nyawa manusia dan kesehatan bagi semua harus menjadi prioritas. Varian Delta yang menular puluhan kali lebih cepat tidak mampu lagi dibendung hanya dengan protokol kesehatan yang sebelumnya telah disiapkan oleh pegiat festival. Prambanan Jazz Festival kembali urung dihelat.

Tidak mau terus terpuruk oleh keadaan yang serba tidak menentu, Anas Syarul Alimi, Founder PJF sekaligus CEO PT Rajawali Indonesia ,memutuskan tetap menghelat PJF 2021 dengan konsep virtual sebagaimana penyelenggaraan tahun lalu.

Anas mengatakan, Prambanan Jazz Festival ke-7 seharusnya dilaksanakan 2 hingga 4 Juli 2021. Pihaknya sudah menyiapkan konsep *hybrid* yang memungkinkan dapat disaksiskan secara *offline* secara terbatas dan ada *online* bagi penonton yang mau menyaksikan dari rumah. Namun tiba-tiba ada kebijakan dari pemerintah yaitu PPKM Darurat, maka konsep ini *posponed* lagi.

"Pada akhirnya kita putuskan bahwa Prambanan Jazz harus tetap diselenggarakan. Prambanan Jazz menolak menyerah dengan keadaan. Kita tetap harus jalan dan akhirnya menentukan tanggal 11 September 2021," paparnya kepada wartawan secara daring, Kamis (5/8/2021).

Tahun ini, Prambanan Jazz Festival mengangkat tema *Borneo Goes to Prambanan Jazz Virtual Festival*. Kegiatan ini diharapkan akan menjadi ajang kesempatan bagi musisi yang berdomisili di Kalimantan untuk menunjukkan karya mereka kepada khalayak luas pecinta musik tanah air.

"Keadaan ini kita harus saling kolaborasi dan suport antara musisi, promotor, sponsor, dan semuanya. Saling kolaborasi, bagi saya, dalam kondisi seperti ini adalah yang paling pas dilakukan. Bukan lagi kompetisi, kita harus saling suport antara semua pihak," paparnya.

Kami, lanjut Anas, akan punya *venue* pembeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada perhelatan PJF ke 7 ini pihaknya akan banyak melakukan kolaborasi dari beberapa artis nasional atau musisi, tetapi juga dengan beberapa seniman. Hal ini akan menjadikan sebuah tontonan yang sangat menarik yang mungkin di luar ekspektasi penikmat musik.

Sementara Kiki Pea, musisi, komikus yang juga salah satu tim kreatif di i-Konser, menambahkan nantinya seluruh musisi/band pendaftar akan dikurasi oleh promotor Prambanan Jazz Festival. Sehingga akan didapat maksimal 100 band yang diikutsertakan dalam seleksi.

Akan ada 3 musisi Kalimantan yang akan menjajal panggung megah Prambanan Jazz Virtual Festival 2021 dan juga tampil pada beberapa program tayangan *channel* I-Konser di UseeTV. Satu musisi akan dipilih langsung oleh promotor, sedangkan dua lainnya akan melalui beberapa tahapan seleksi dan kurasi oleh 3 Juri (musisi nasional, promotor, tokoh musik Kalimantan).

"Karena situasi pandemi yang masih belum menentu, penjurian akan dilakukan virtual (terpisah) dengan peserta yang mengikuti seleksi," lanjutnya.

Peserta *Borneo Goes To Prambanan Jazz Virtual Festival* adalah musisi/band yang berdomisili di Kalimantan yang sesuai dengan karakter festival musik.

Para peserta tersebut diharuskan memiliki minimal tiga karya orisinil berupa video musik/*video live session*. Pemenang yang terpilih untuk tampil di Prambanan Jazz Virtual Festival diharapkan bisa menampilkan setidaknya empat lagu orisinil.

Peserta *Borneo Goes To Prambanan Jazz Virtual Festival* adalah musisi/band yang berdomisili di Kalimantan, dibuktikan cukup dengan satu KTP dan terbuka untuk seluruh genre musik dan jenis penampil musik (solo, duo, band, dan sejenisnya) yang sesuai dengan karakter festival.

"Dengan adanya *Borneo Goes To Prambanan Jazz Virtual Festival* ini diharapkan akan muncul nama-nama baru dari pulau Kalimantan yang berkilau di blantika musik Indonesia," kata Kiki.

"Akan ada aroma-aroma Kalimantan saat musisi ini memainkan musik mereka. Sama saat kita mencium aroma Yogyakarta saat Sheila on 7 tampil di panggung musik," lanjutnya.

Tidak hanya Kalimantan. Nantinya seluruh daerah di Indonesia juga akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa tampil di Prambanan Jazz Festival selanjutnya, maupun tayangan-tayangan di I-Konser Channel.

Rijanto Utomo, EVP Telkom Regional 6, menambahkan menggaungkan suara Borneo merupakan kewajiban bersama. Juga membangun seluruh bangsa Indonesia, khususnya regional. Event-event terbaik di regional dibawa menasional agar orang yang memiliki kemampuan bisa tampil begitu megah seperti Prambanan Jazz.

"Ini menunjukkan bahwa pandemi ini bukan halangan, tetapi merupakan kesempatan untuk belajar sehingga kita bisa membiasakan normal baru ini dengan cara yang bagus," tutupnya. **(rne)**

DOK.KORANBERNAS.ID

Nadin Amizah dalam Perhelatan Prambanan Jazz Virtual Festival pada 2020 silam